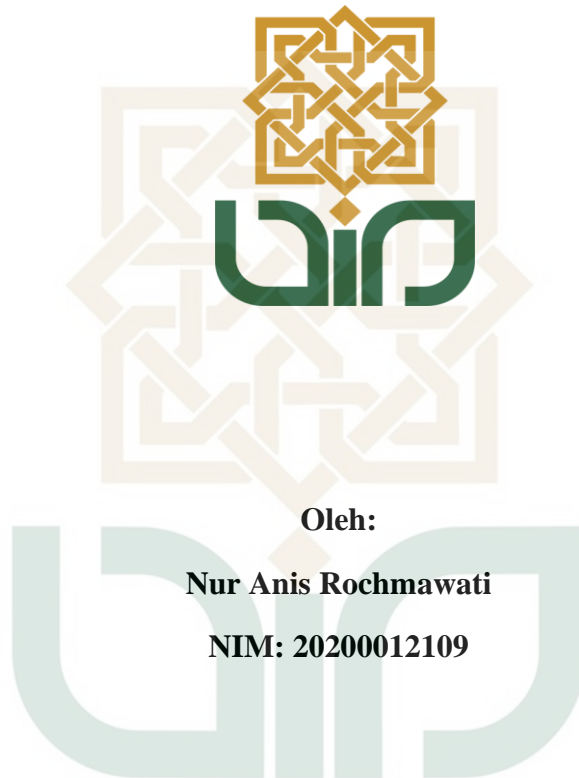


**NEGARA DAN DERADIKALISASI KEAGAMAAN:**

**Narasi Resmi Moderasi Beragama**



**Oleh:**

**Nur Anis Rochmawati**

**NIM: 20200012109**

**TESIS**

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar *Master of Arts* (M.A.)

Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi Islam Nusantara

**YOGYAKARTA**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Anis Rochmawati  
NIM : 20200012109  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Islam Nusantara

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 31 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



**Nur Anis Rochmawati**

NIM: 20200012109

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Anis Rochmawati  
NIM : 20200012109  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Islam Nusantara

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



**Nur Anis Rochmawati**

NIM: 20200012109

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-819/Un.02/DPPs/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : Negara dan Deradikalisasi Keagamaan: Narasi Resmi Moderasi Beragama

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR ANIS ROCHMAWATI, S.Ag  
Nomor Induk Mahasiswa : 20200012109  
Telah diujikan pada : Rabu, 16 Agustus 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ja'far Assagaf, M.A.

SIGNED

Valid ID: 64e81e85f3115



Penguji II

Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.

SIGNED

Valid ID: 64e7eb007a762



Penguji III

Achmad Uzair, S.IP., M.A, Ph.D.

SIGNED

Valid ID: 64e8135e094e7



Yogyakarta, 16 Agustus 2023

UIN Sunan Kalijaga

Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 64ec5e8198560

*NOTA DINAS PEMBIMBING*

Kepada Yth.,  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: **NEGARA DAN DERADIKALISASI KEAGAMAAN: Narasi Resmi Moderasi Beragama**

Yang ditulis oleh:

Nama : Nur Anis Rochmawati  
NIM : 20200012109  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Islam Nusantara

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Master of Arts (M.A.)

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 31 Juli 2023  
Pembimbing



Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag, M.A

## ABSTRAK

Moderasi beragama sebagai salah satu program deradikalisasi keagamaan yang dirumuskan pemerintah Indonesia, pada wilayah publik memunculkan kekhawatiran dari sejumlah kelompok, bahwa negara akan mengintervensi dan membatasi kehidupan beragama di ruang publik. Berpijak pada realitas tersebut, meminjam tilikan Peter Mandaville dan Melissa Nazell, negara berpotensi menggunakan tokoh agama sebagai alat untuk menetralsir radikalisme. Tesis ini berusaha mengkaji relasi kuasa dalam program moderasi beragama yang dibangun mulai dari dataran ide hingga praksis. Tesis ini akan menjawab beberapa pertanyaan penting: (a) mengapa negara berkepentingan untuk menjadikan moderasi beragama sebagai program nasional? (b) bagaimana konstruksi narasi resmi moderasi beragama? (c) bagaimana relasi kuasa dalam narasi resmi moderasi beragama?

Pendekatan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah tersebut adalah Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough dan Praksis Sosial Pierre Bourdieu. Riset ini menyimpulkan bahwa moderasi beragama muncul karena meningkatnya radikalisme keagamaan yang ditandai oleh terorisme, politik syariat, penolakan terhadap liberalisme Islam, gerakan 212, serta tumbuh suburnya *hate speech* atas nama agama. Kementerian Agama sebagai *leading sector* membangun narasi bahwa moderasi beragama dapat terejawantah melalui sikap-sikap: menerima konstitusi, membudayakan toleransi, merawat budaya damai anti-kekerasan, serta menerima budaya indigenos. Perlu dicatat bahwa ini adalah representasi dari dua ormas keagamaan Islam, NU dan Muhammadiyah, yang pada dataran praktis keduanya memang ditempatkan sebagai pilar moderasi beragama. Kendati demikian, keberhasilan NU untuk membangun aliansi dengan pemerintahan Joko Widodo berdampak pada ditematkannya NU sebagai aktor utama *soft power* deradikalisasi keagamaan. Negara memberikan ruang yang lebih besar mulai dari penyusunan dokumen resmi hingga proses diseminasi moderasi beragama.

**Kata Kunci:** Deradikalisasi Keagamaan, Moderasi Beragama, Negara

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, setelah melakukan penelitian dan bergelut dengan berbagai literatur baru lintas disiplin, akhirnya tesis ini dapat selesai. Lahirnya tesis ini tentu tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan banyak pihak, baik secara langsung ataupun tidak. Pertama adalah Bapak Moch. Nur Ichwan, selaku dosen pembimbing tesis. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya untuk mengarahkan penelitian saya; memberikan masukan, saran, dan kritikan yang membangun. Dari proses bimbingan ini saya banyak belajar bagaimana cara membaca data serta cara menarasikannya dalam teks. Juga kepada Bapak Achmad Uzair dan Bapak Ja'far Assagaf; dosen penguji yang telah memberikan masukan-masukan untuk perbaikan tesis saya.

Tidak lupa kepada Pascasarjana Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies yang telah memberi kesempatan untuk meningkatkan kemampuan akademik saya. Terkhusus kepada beberapa dosen yang telah banyak memberi masukan dan berbagi pengalaman di bidang keilmuan seperti Prof. Machasin yang cukup berhasil memengaruhi minat studi saya agar melirik gerakan-gerakan keagamaan; Bapak Jazilus Sakhok, cara mengajarnya di semester satu banyak menginspirasi saya agar secara serius melatih kemampuan untuk menulis; Bapak Najib Kailani yang memberi banyak masukan tentang kerja riset—khususnya cara menempatkan kajian dalam isu besar; Bapak Munirul Ikhwan dan Prof. Ibnu Burdah yang telah membantu menyusun proposal tesis di semester tiga. Demikian juga, salam hormat saya kepada dosen-dosen di bidang kajian Islam Nusantara: Prof. Abdul Karim, Bapak Soehada, Bapak Maharsi, dan beberapa dosen lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu di sini.

Terima kasih kepada teman-teman satu angkatan, Mas Nor Kholis, Mas M. Ubaidillah, Mas Ilyas Fahmi Ramadhani, dan Mbak Fitri Andriyani, yang sudah sejak sangat awal mempersamai studi saya di konsentrasi Islam Nusantara. Senang menjadi bagian dari kalian. Juga kepada Rika Leli Dewi Khusaila Rosalnia, Fikri Fanani, Fakhri Afif, dan Egi Tanadi Taufik yang selalu

menghadirkan ruang diskusi yang hangat dan menarik. Sayang dilupakan, Mbak Nailin Najihah, Mbak Dede Nur Sopiati, Mbak Linda Amala Udzma, Putri Asyifa, Layyinatus Shofiyah, dan teman-teman Ponpes Sunni Darussalam lain yang kebersamai saya dalam menyelesaikan tugas akhir, baik di asrama ataupun tempat ngopi. Dan pastinya, Bento Kopi Maguwoharjo, Lestari Corner Coffee, Mato Kopi 2, kalian adalah tempat-tempat yang harus saya abadikan dalam tesis ini.

Pada akhirnya, tesis yang dikerjakan dengan melibatkan serta merepotkan banyak pihak ini selesai. Meski demikian belum bisa disebut sempurna. Oleh karenanya, bagi para pembaca jika menemukan banyak kekurangan dan kelemahan--baik dari sisi penulisan, penyajian data, cara berpikir yang kurang sistematis--berkenan memberikan kritik yang membangun.

Yogyakarta, 31 Juli 2023

Penulis

Nur Anis Rochmawati



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk keluarga saya:

Rusbani

Binti Surtinik

Bapak-ibu yang senantiasa mewariskan semangat pembelajar. Terima kasih. Ini adalah bentuk kecil baktiku padamu.

\*\*\*

Agus Sholihul Huda

Kakak kedua yang berbaik hati memberikan beasiswa untuk studi saya.

\*\*\*

Gus Ansor Al Bustomi, Latifatuz Zahro

Aqna Hurun'in Dzumirroh, Muhammad Syafiq Amrullah

Kakak sulung beserta keluarga kecilnya yang senantiasa menyuntikkan semangat dan dukungan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **MOTTO**

“Jika terasa baik—lakukanlah!”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II: REFORMASI, DEMOKRATISASI, DAN RADIKALISME AGAMA .....</b>	<b>22</b>
A. Reformasi dan Demokratisasi .....	22
B. Fenomena Radikalisasi Keagamaan.....	29
1. Islam dan Terorisme.....	29
2. Politik Syariat.....	34
3. Penolakan terhadap Liberalisme Islam .....	39
4. Gerakan 212 .....	44
5. Tumbuh Suburnya <i>Hate Speech</i> atas Nama Agama .....	47

<b>BAB III: NEGARA DAN DERADIKALISASI KEAGAMAAN .....</b>	<b>51</b>
A. Negara dan Radikalisme Agama.....	51
1. Respon Hukum Anti-Terrorisme.....	51
2. Lembaga Anti-Terrorisme.....	53
3. Kementerian.....	57
B. Pendekatan Deradikalisasi .....	60
1. Pendekatan <i>Hard Power</i> .....	60
2. Pendekatan <i>Soft Power</i> .....	65
<b>BAB IV: KEMENTERIAN AGAMA DAN KONSTRUKSI WACANA RESMI MODERASI BERAGAMA.....</b>	<b>70</b>
A. Kementerian Agama Era Reformasi .....	70
B. Program Nasional Moderasi Beragama .....	76
C. Moderasi Beragama sebagai Deradikalisasi Keagamaan.....	80
D. Konstruksi Wacana Resmi Moderasi Beragama.....	82
1. Dokumen Resmi Moderasi Beragama .....	82
2. Pengertian Moderasi Beragama .....	86
3. Kualifikasi “Moderat” Menurut Program Moderasi Beragama.....	91
<b>BAB V: RELASI KUASA DALAM MODERASI BERAGAMA .....</b>	<b>102</b>
A. Penguatan Moderasi Beragama oleh Kementerian Agama.....	103
B. Peran Organisasi Keagamaan Islam dalam Moderasi Beragama.....	109
1. Artikel .....	110
2. Berita.....	116
C. Posisi Strategis Ormas Keagamaan Islam di Pemerintahan Joko Widodo ...	123
1. Ormas Keagamaan Islam dalam Kebijakan Negara.....	123
2. Jabatan dalam Kementerian Agama.....	127
D. Titik Temu Moderasi Beragama dan Ormas Keagamaan Islam .....	130
1. Titik Temu di Tingkat Wacana .....	130
2. Titik Temu di Tingkat Praksis.....	144
E. Nahdlatul Ulama: Aktor Utama <i>Soft Power</i> Deradikalisasi Keagamaan.....	151
<b>BAB VI: PENUTUP.....</b>	<b>157</b>
A. Kesimpulan .....	157

B. Saran.....	161
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>162</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>184</b>



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1 Buku “Moderasi Beragama”
- Gambar 4.2 Buku “ Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama
- Gambar 5.1 Artikel Moderasi Beragama di Website Ormas Keagamaan Islam (Oktober 2019-Mei 2023)
- Gambar 5.2 Berita Moderasi Beragama di Website Ormas Keagamaan Islam (Oktober 2019-Mei 2023)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Moderasi beragama menjadi diskursus baru yang mengemuka dan menjadi sorotan publik. Gerakan 212 yang dibarengi dengan menguatnya islamisme,<sup>1</sup> membawa implikasi negatif pada kegelisahan psikologi sosial dalam sistem demokrasi Indonesia.<sup>2</sup> Pergeseran spektrum keagamaan yang cenderung menempatkan Islam *vis a vis* Pancasila dan maraknya ragam kekerasan dengan mengatasnamakan agama,<sup>3</sup> seakan menjadi petanda pembalikan wajah Islam Indonesia. Berdasar Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan yang dirilis Kementerian Agama pada 2018,<sup>4</sup> isu-isu yang mengemuka umumnya berkaitan dengan aliran, paham, gerakan keagamaan yang selanjutnya menggeret sejumlah konflik.<sup>5</sup> Peristiwa peledakan bom bunuh diri (Surabaya, 2018) yang bertempat di gereja dan markas polisi menjadi satu sampel yang menghadirkan

---

<sup>1</sup>Banyak pihak menengarai aksi 212 menjadi puncak konservatisme Islam Indonesia. Demonstrasi kolosal (2016) di Monumen Nasional, Jakarta yang digawangi Rizieq Shihab (imam besar Front Pembela Islam), diikuti dan diamini hampir seluruh organisasi Islam--baik secara individu maupun organisasi. Rizieq menggaungkan perlunya Indonesia menjadi NKRI Bersyariah, yang kembali diperkuatnya pada reuni 212 pada 2017. Di sini para sarjana dan pengamat menilai adanya indikasi perubahan peta Islam Indonesia menuju islamis. Denny JA, *NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?* (Jakarta: Cerah Budaya Indonesia, 2019), 1.

<sup>2</sup>Abdul Malik dan Busrah, 'Relasi Pemerintah dan Akademisi dalam Isu Moderasi Beragama di Indonesia', *Substantia*, 23.2 (2021), 121.

<sup>3</sup>Ismatu Ropi, 'Kata Pengantar', dalam *Konstruksi Moderasi Beragama, Catatan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2021), ix.

<sup>4</sup>Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan 9* (Jakarta, 2018).

<sup>5</sup>Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 59.

stigma negatif terhadap umat Islam sebagai aktor aksi terorisme.<sup>6</sup> Jika dirunut lebih jauh, semenjak reformasi bergulir, aksi terorisme di Indonesia relatif semakin meningkat. Pada rentang tahun 2000-2009, aksi teror berlatar agama memakan 286 korban jiwa dan melukai lebih dari 700 orang.<sup>7</sup> Di luar negara-negara Timur Tengah dan Asia Selatan seperti Afghanistan dan Pakistan, Indonesia menjadi salah satu negara paling terdampak aksi terorisme. Di antara teror yang paling strategis adalah bom Bali I (2002), bom kantor Kedutaan Besar Australia (2004), bom Bali II (2005), bom Hotel JW Marriot dan Ritz-Carlton, Jakarta (2009).<sup>8</sup>

Di samping terorisme, perkembangan kasus intoleransi tidak kalah maraknya. Tercatat beberapa kekerasan berlatar agama, seperti kasus Cikeusik, Pandeglang (yang melibatkan Ahmadiyah sebagai korban), kekerasan di Temanggung (yang melibatkan pembakaran dan perusakan gereja), dan insiden pengiriman bom-bom buku, serta bom bunuh diri di Masjid Mapolres Kota Cirebon.<sup>9</sup> Di sejumlah daerah, kelompok muslim absolutis kerap menghambat pembangunan gereja yang sebenarnya telah mendapat izin pembangunan.<sup>10</sup> Dengan wajah demikian, agama seakan punya dua potensi paradoksal; sumber perdamaian sekaligus konflik. Agama menghidupkan kemanusiaan, dan pada saat

---

<sup>6</sup>Mohamad Abdul Choliq, 'Aplikasi Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough dalam Buku Wasatiyyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama Karya M. Quraish Shihab' (Uin Sunan Ampel Surabaya, 2022), 10.

<sup>7</sup>Petrus R. Golose, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumput* (Jakarta: YPKIK, 2010), 42-43.

<sup>8</sup>Muhammad AS. Hikam, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2016), 69.

<sup>9</sup>Hikam, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat*, 70.

<sup>10</sup>Cherian George, *Pelintiran Kebencian: Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya Bagi Demokrasi*, ed. Tim PUSAD Paramadina dan IIS UGM (Jakarta: PUSAD Yayasan Paramadina, 2017), 146.



yang sama membunuhnya.<sup>11</sup> Wajah baru Reformasi ini dikontraskan dengan “wajah Islam yang tersenyum” pada masa Orde Baru; diskursus keislaman yang toleran dan terbuka sebagaimana dihadirkan Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid.<sup>12</sup>

Pemerintah Indonesia telah dan terus melakukan beragam strategi penanganan melalui pendekatan *hard power*. Megawati menandatangani dua ketetapan darurat anti-terorisme dengan memberikan wewenang untuk menangkap tersangka teroris berdasar informasi intelijen dan menahannya selama seminggu tanpa dakwaan, atau lebih lama jika dibenarkan intelijen. Indikator penting dari tekad pemerintah adalah keputusannya menangkap Ba’asyir atas tuduhan pemberontakan dan pemalsuan dokumen keimigrasian. Pada Mei 2002, pemimpin Laskar Jihad, Ja’far Umar Thalib ditangkap dengan dakwaan menghasut kekerasan agama dan membuat ancaman publik terhadap presiden. Penangkapan tersebut menuai protes dari beberapa partai politik keislaman dan organisasi Islam radikal seperti KISDI dan DDII. Peristiwa penting partisipasi Indonesia melawan terorisme adalah penangkapan dan pemindahan Omar al-Faruq ke tahanan Amerika Serikat, yang ketika itu diidentifikasi sebagai agen al-Qaeda paling senior di Asia Tenggara.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Moch. Nur Ichwan dan Ahmad Muttaqin, *Agama dan Perdamaian, Dari Potensi Menuju Aksi* (Yogyakarta: CR-Peace, 2012), vi.

<sup>12</sup>Wacana yang mendukung program pembangunan pemerintah, menerima ideologi Pancasila, mengembangkan hubungan harmonis dengan non-Muslim, dan menolak gagasan negara Islam. Zainal Abidin Bagir, ‘Membaca Beragam Wajah Islam Indonesia’, dalam *Conservative Turn: Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme* (Bandung: Mizan Publika, 2014), 12.

<sup>13</sup>Angel M. Rabasa, ‘Southeast Asia: Moderate Tradition and Radical Challenge’, dalam *The Muslim World After 9/11*, ed. Angel M. Rabasa (California: Rand Corporation, 2004), 396-398.

Meski menghasilkan capaian yang signifikan dan bahkan mendapat pengakuan internasional, *hard power* dirasa tidak efektif untuk jangka panjang.<sup>14</sup> Upaya yang ditempuh pemerintah secara *violence*: melalui tindakan represif, proses hukum, penangkapan, penyidikan, lalu eksekusi, merupakan upaya memotong aksi teror dari tengah dan dianggap tidak menyentuh akar permasalahan.<sup>15</sup> Fenomena gerakan fundamentalisme, radikalisme, dan aksi-aksi terorisme seharusnya tidak hanya diredam dengan menasar para pendukung, pelaku teror, dan mereka yang menjadi tahanan saja, melainkan juga harus diperluas kepada organisasi masyarakat sipil.<sup>16</sup> Bertolak dari hal itu, pendekatan *soft power* yang bersifat preventif dianggap penting untuk menetralsir dan mengantisipasi penyebaran ideologi radikalisme, khususnya yang bersumber dari pemahaman keagamaan yang dianggap sebagai landasan aksi-aksi kekerasan.<sup>17</sup>

Moderasi beragama dengan jargon *harmony in diversity*-nya,<sup>18</sup> diusung sebagai upaya meng-*counter* tantangan serius yang masih terus berkecamuk di tengah kehidupan keberagaman masyarakat Indonesia.<sup>19</sup> Kerja moderasi beragama, sebagai sebuah *soft approach* yang secara prinsip berusaha menjadi penengah, perangkul, dan pengayom digadang-gadang menjadi satu upaya yang tepat.<sup>20</sup> Dukungan mengalir dari berbagai kalangan. Tercatat tokoh-tokoh

---

<sup>14</sup>Hikam, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat*, 38.

<sup>15</sup>Muridan dan Nurma Ali Ridlwan, *Islam: Deradikalisasi dan Wacana Media* (Banyumas: Rizquna, 2020), 3.

<sup>16</sup>Hikam, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat*, 80.

<sup>17</sup>Hikam, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat*, 38.

<sup>18</sup>Malik dan Busrah, 'Relasi Pemerintah dan Akademisi' 121.

<sup>19</sup>Trisno Sutanto, dkk., 'Menakar Moderasi Beragama: Pembacaan Kritis', dalam *Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama: Suatu Tinjauan Kritis*, ed. Zainal Abidin Bagir dan Jimmy M.I, Sormin (Jakarta: Gramedia, 2022), 8.

<sup>20</sup>Ma'mun Murod Al-Barbasy, 'Moderasi Beragama Tanpa Makna', *Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 2022 <<https://umj.ac.id/opini/moderasi-beragama-tanpa-makna/>>.

perwakilan organisasi masyarakat keagamaan: Imam Pituduh (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), Amar Faozan (Pengurus Pusat Muhammadiyah), Budi Tanuwibowo (Majelis Tinggi Agama Khonghucu), Profesor Filip (Persatuan Umat Buddha Indonesia), menyambut positif gagasan tersebut. Argumentasinya, bahwa indikator-indikator kunci dalam program moderasi beragama seperti komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan pada tradisi sejalan dengan ajaran masing-masing agama yang mereka yakini.<sup>21</sup>

Moderasi beragama sebagai solusi untuk merajut hidup harmonis<sup>22</sup> cukup gencar dikampanyekan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Agama. Negara mengalokasikan Rp. 21.945,4 miliar untuk keberhasilan program ini. Berbagai kegiatan mulai dari seminar, webinar, upacara seremonial, hingga penyusunan buku-buku modul dan buku ajar dilakukan dengan semarak. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yang dikeluarkan pada 17 Januari 2020, moderasi beragama ditempatkan sebagai salah satu bagian “Pembangunan Karakter” yang menjadi strategi pembangunan sumber daya manusia.<sup>23</sup>

Pemerintah sadar bahwa moderasi beragama hanya akan efektif jika turut melibatkan masyarakat sipil para pemangku kepentingan. Gaung akbarnya tidak lepas dari tokoh besar, kelompok, dan instansi-instansi keagamaan yang turut terlibat menghadirkannya ke ruang publik.<sup>24</sup> Nama-nama seperti Alissa Wahid,

---

<sup>21</sup>Sutanto, dkk., 'Menakar Moderasi Beragama', 6.

<sup>22</sup>Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 12.

<sup>23</sup>Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*, 2020.

<sup>24</sup>Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad ke-20* (Jakarta: Democracy Project, 2012), 63.

Ali Zawawi, Hadi Rahman, Kamaruddin Amin, Muchlis Hanafi, dan Yudi Latif kemudian tercatat sebagai penasih buku “Moderasi Beragama” sebagai prinsip yang mendasari kampanye dalam program deradikalisasi.<sup>25</sup> Selanjutnya, pada 29 Oktober 2019 Kementerian Agama mengirim surat edaran kepada seluruh rektor dan pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) untuk membuat dan menata “Rumah Moderasi Beragama”. Masing-masing memberikan respon positif. Meski dengan program kerja yang berbeda, Rumah Moderasi dibuat untuk visi yang sama; membangun lingkungan keagamaan beradab.<sup>26</sup> Di samping PTKIN, dua organisasi masyarakat besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tidak luput dilibatkan dalam kampanye. Keterlibatan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah jelas punya pijakan politis-historis yang kuat. Keduanya menjadi bagian penting dari diterimanya Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa.<sup>27</sup> Tidak heran jika keduanya kemudian secara resmi mendukung dan mengadvokasi toleransi, pluralisme, dan perlindungan kelompok minoritas dalam banyak kesempatan.<sup>28</sup>

Kontestasi dan dialektika narasi moderasi beragama sebagai upaya deradikalisasi akan terus bergulir. Usaha penyeragaman masyarakat Indonesia atas sikap toleran terus dilakukan. Dalam konteks historis, tidak dapat dinegasikan bahwa deradikalisasi melalui program moderasi beragama yang dikembangkan

---

<sup>25</sup>Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, xi.

<sup>26</sup>Rumah moderasi diasosiasikan sebagai pusat pendidikan, pendampingan, pengaduan, penguatan wacana, juga memfasilitasi pergerakan wacana moderasi beragama. Rifki Rosyad, ‘Urgensi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam melalui Media Digital’, dalam *Kampanye Moderasi Beragama, Dari Tradisional Menuju Digital* (Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati, 2021), 273.

<sup>27</sup>Hikam, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat*, xii-xiii.

<sup>28</sup>United States Department of State: Office of International Religious Freedom, *International Religious Freedom Report for 2020* (United States, 2021), 23.

era Reformasi adalah kelanjutan dari kerja nasional oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya. Kebijakan deradikalisasi menjadi kelanjutan proses *nation and character building* di era Sukarno serta kebijakan penghayatan dan pengamalan Pancasila pada pemerintahan Suharto. Titik perbedaan hanya terletak pada wujud dan prioritas ancaman nasional, sesuai persepsi tiap-tiap rezim berdasar situasi dan kondisi yang berkembang.<sup>29</sup>

Dalam bukunya, *Religion and Regulation in Indonesia*, Ismatu Ropi mengatakan bahwa dalam sejarah bangsa ini kebijakan keagamaan yang diberlakukan selalu berkait-kelindan dengan rezim pemerintahan yang sedang berkuasa. Dinamika dan perubahan kebijakan sudah cukup dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan dan kepentingan politik. Lebih lanjut dikatakan, setidaknya muncul tiga faktor yang cukup berpengaruh dalam dinamika kebijakan negara terkait agama: konstitusi, tipe rezim, dan kelompok agama.<sup>30</sup> Meminjam ungkapan Rainer Forst (filsuf kontemporer), “sebuah kebijakan merupakan praktik kuasa dan dominasi. Ia membekukan identitas dan menghasilkan subjek-subjek yang sudah didisiplinkan.”<sup>31</sup> Berangkat dari tesis tersebut, penelitian ini menjadi upaya untuk melihat sejauh mana relasi kuasa yang muncul dalam narasi resmi moderasi beragama--mulai dari penyusunan dokumen resmi hingga praksisnya—melalui berbagai kepribadian dan jaringan yang terbentuk.

---

<sup>29</sup>Hikam, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat*, ix.

<sup>30</sup>Ismatu Ropi, *Religion and Regulation in Indonesia* (Gateway East, Singapore: Palgrave Macmillan, 2017), 18-26.

<sup>31</sup>Wendy Brown dan Rainer Forst, *The Power of Tolerance: A Debate*, ed. Luca di Blasi dan Christoph F. E. Holzhey (New York: Columbia University Press, 2014), 31-32.

## B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang sebelumnya, tesis ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan berikut:

1. Mengapa negara berkepentingan untuk menjadikan moderasi beragama sebagai program nasional?
2. Bagaimana konstruksi narasi resmi moderasi beragama?
3. Bagaimana relasi kuasa dalam narasi resmi moderasi beragama?

## C. Tujuan Penelitian

Tesis ini hendak mempertanyakan program moderasi beragama melalui tiga fokus persoalan utama. Berangkat dari diskusi mutakhir perihal menggemanya politisasi agama,<sup>32</sup> *pertama*, berusaha memahami alasan negara untuk menjadikan moderasi beragama sebagai program nasional. Dalam hal ini, konteks sosial politik yang membentuk akan dielaborasi secara mendalam. Selanjutnya, *kedua*, eksplorasi terhadap konstruksi narasi resmi melalui dokumen resmi moderasi beragama. Dari eksplorasi tersebut, *ketiga*, mendiskusikan relasi kuasa melalui dominasi rezim.

Beberapa persoalan tersebut, secara umum turut berkontribusi pada diskusi terkait reliabilitas konsep moderasi beragama, yang dewasa ini telah menjadi tren global.<sup>33</sup> Bahkan, PBB—melalui persidangan Majelis Umum--merasa perlu

---

<sup>32</sup>Sumanto Al-Qurtuby, 'Sejarah Politik Politisasi Agama dan Dampaknya di Indonesia', *Maarif*, 13.2 (2018).

<sup>33</sup>Sutanto, dkk., 'Menakar Moderasi Beragama', 5.

menetapkan tahun 2019 sebagai *International Year of Moderation*.<sup>34</sup> Marak dan dominannya diskursus moderasi beragama menarik perhatian untuk didedah secara mendalam. Selanjutnya, perlu menelisik pengalaman dan pergulatan sosio-historis agama dalam konteks dekat. Oleh karenanya, secara spesifik tesis ini berkontribusi pada diskusi terkait moderasi beragama di Indonesia yang selama ini ditempatkan sebagai solusi masalah sosial<sup>35</sup> dan dianggap menjadi kata kunci bagi agama di masa depan.<sup>36</sup>

#### D. Kajian Pustaka

Ragam model pendekatan deradikalisasi telah dihadirkan di berbagai negara.<sup>37</sup> Gabriel Hoefl mencatat setidaknya ada 40 program yang didedikasikan untuk meng-*counter* radikal-terorisme.<sup>38</sup> Salah satu diantaranya adalah moderasi,<sup>39</sup> yang kini tengah menjadi diskursus terkemuka di Indonesia. Hal itu

---

<sup>34</sup>United Nations, 'Resolutions Promoting Moderation, Establishing International Day of Living Together in Peace Adopted by General Assembly' (Meetings Coverage and Press Releases, 2017).

<sup>35</sup>Sumintak dan Iin Ratna Sumirat, 'Moderasi Beragama dalam Perspektif Tindakan Sosial Max Weber', *Al-Adyan*, 3.1 (2022); Sri Wahyuni, dkk., 'Moderasi Beragama dalam Menangkal Bahaya Disintegrasi Bangsa, Tinjauan Revolusi Mental Perspektif Al-Qur'an', *Al-Asas*, 6.1 (2021); Mhd. Abror, 'Moderasi Beragama dalam Bingkai Toleransi: Kajian Islam dan Keberagaman', *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 1.2 (2020); Priyantoro Widodo dan Karnawati, 'Moderasi Agama dan Pemahaman Radikalisme di Indonesia', *Pasca: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 15.2 (2019).

<sup>36</sup>Bartolomeus Samho, 'Urgensi Moderasi Beragama untuk Mencegah Radikalisme di Indonesia', *Sapientia Humana: Jurnal Sosial Humaniora*, 2.1 (2022).

<sup>37</sup>Alex P. Schmid, 'Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion and Literature Review' (ICCT Research Paper, 2013); International Peace Institute, *A New Approach? Deradicalization Programs and Counterterrorism*, 2010; Paul K. Davies, dkk., *Social Science for Counterterrorism: Putting the Pieces Together* (Santa Monica: Rand Corporation, 2009).

<sup>38</sup>Gabriel Hoefl, 'Soft Approaches to Counter-Terrorism: An Exploration of the Benefits of Deradicalization Programs' (International Institute for Counter-Terrorism, 2015), 58.

<sup>39</sup>Arie W. Kruglanski dkk, 'The Psychology of Radicalization and Deradicalization: How Significance Quest Impacts Violent Extremism', *Advances in Political Psychology*, 35.1 (2014).

ditengarai dengan maraknya kampanye yang dilakukan berbagai kalangan,<sup>40</sup> juga riset-riset dari sudut pandang agama,<sup>41</sup> sosial,<sup>42</sup> budaya,<sup>43</sup> hingga pendidikan<sup>44</sup> yang kian menjadi tren baru di kalangan akademisi.

Moderasi beragama sebagai solusi atas problem intoleransi dan radikal-terorisme di Indonesia, ditegaskan Kamaruddin Amin<sup>45</sup> dan Masdar Hilmy<sup>46</sup> melalui argumentasinya terkait peran moderasi beragama dalam mendukung stabilitas perdamaian. Guru Besar Sosiologi Agama UIN Sunan Ampel Surabaya, Ahmad Zainul Hamdi bahkan mengajak masyarakat untuk melihat moderasi beragama sebagai sebuah diskursus yang dibangun untuk menghadapi tantangan serius; fenomena kekerasan atas nama agama, tingginya tingkat intoleransi, dan

---

<sup>40</sup>Paelani Setia, *Kampanye Moderasi Beragama: Dari Tradisional Menuju Digital* (Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama Uin Sunan Gunung Djati, 2021).

<sup>41</sup>Ade Jamarudin, dkk., 'Implementing Religious Moderation Using the Perspective of the Qur'an' (KnE Social Sciences: International Conference: Transdisciplinary Paradigm on Islamic Knowledge, 2022); Farhan Triana Rahman, 'Moderasi Beragama Menurut Sayyid Qutb, Kajian Sosio Historis Penafsiran Sayyid Qutb Pada QS Al-Baqarah Ayat: 143 Dalam Kitab Fi Zhilali Al-Qur'an' (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021); Sania Alfaini, 'Perspektif Al-Qur'an tentang Nilai Moderasi Beragama untuk Menciptakan Persatuan Indonesia', *Permata*, 2.2 (2021); Erwin Mahrus, dkk., 'Messages of Religious Moderation Education in Sambas Islamic Manuscripts', *Madania*, 24.1 (2020).

<sup>42</sup>Yudhi Kawangung, 'Religious Moderation Discourse in Plurality of Socil Harmony in Indonesia', *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 3.1 (2019); Fatmawati Anwar dan Islamul Haq, 'Religious Moderation Campaign Through Social Media at Multicultural Communities', *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 12.2 (2019); Muhammad Alviridho Prayoga, dkk., 'Moderasi Beragama Antara Umat Muslim dan Kristen di Desa Sigara-Gara Kecamatan Patumbak', *Islam & Contemporary Issues*, 1.2 (2021).

<sup>43</sup>Zaitur Rahem, 'Ajaran Moderatisme Beragama Pada Tradisi Ngunjeng Tandhe' (Annual Conference for Muslim Scholars, 2022); Ahmad Abdul Rouf, 'Indonesia sebagai Center Point Moderasi Beragama', *Jurnal Al Ghazali*, 5.1 (2022).

<sup>44</sup>Silvia Rahmelia dan Chris Apandie, 'Fostering Religious Moderation's Perception in the 4.0 Era: Citizenship Education Challenge', *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 418 (2021); Donny Khoiril Aziz, dkk., 'Pancasila Educational Values in Indicators Religious Moderation in Indonesia', *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 7.2 (2021).

<sup>45</sup>Kamaruddin Amin, 'Sambutan Direktur Jenderal Pendidikan Islam', dalam *Moderasi Beragama: Dari Indonesia Untuk Dunia*, ed. Arifin Ahmala (Yogyakarta: LKiS, 2019).

<sup>46</sup>Masdar Hilmy, 'Cetak Biru Moderasi Beragama: Urgensi Panduan Normatif dan Aplikatif', dalam *Moderasi Beragama: Dari Indonesia untuk Dunia*, ed. Ahmala Arifin (Yogyakarta: LKiS, 2019).



maraknya pemahaman keagamaan yang eksklusif.<sup>47</sup> Klaim senada disampaikan Arifinsyah, dkk.,<sup>48</sup> Demsy Jura,<sup>49</sup> Ulfatul Husna,<sup>50</sup> Lutfatul Azizah,<sup>51</sup> Babun Suharto, dkk.,<sup>52</sup> Paelani Setia,<sup>53</sup> Elis Teti Rusmiati,<sup>54</sup> dan Mustaqim Hasan.<sup>55</sup>

Pandangan sedikit berbeda muncul dari Zainal Abidin Bagir dan Jimmy M.I. Sormin. Bukan sekadar merespon krisis kebangsaan pada persoalan intoleransi dan radikal-terorisme, keduanya juga menempatkan moderasi beragama sebagai kebijakan resmi pemerintah terkait tata kelola keagamaan. Bahkan keduanya mempertanyakan, apakah gagasan dan program moderasi beragama mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dirumuskannya. Di samping itu, apakah program demikian sejalan dengan komitmen demokrasi? Karena di sana muncul kekhawatiran akan membuka jalan bagi kontrol, pembatasan dan intervensi dari negara secara berlebihan.<sup>56</sup> Sebagaimana yang telah terjadi di beberapa negara.<sup>57</sup>

---

<sup>47</sup>Sutanto, dkk., 'Menakar Moderasi Beragama', 8.

<sup>48</sup>Arifinsyah, dkk., 'The Urgency of Religious Moderation in Preventing Radicalism in Indonesia', *Esensia*, 21.1 (2020).

<sup>49</sup>Demsey Jura, 'Religious Moderation: An Approach of Religious Life in Indonesia', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1.10 (2021).

<sup>50</sup>Ulfatul Husna, 'Moderasi Beragama di SMA Negeri 1 Krembung-Sidoarjo, Suatu Pendekatan Pendidikan Agama Islam dalam Menghadapi Tantangan Ekstrimisme' (Uin Sunan Ampel Surabaya, 2020).

<sup>51</sup>Lutfatul Azizah, *Refleksi Moderasi Beragama dalam Penyelesaian Konflik Ahmadiyah Lombok* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022).

<sup>52</sup>Babun Suharto, dkk., *Moderasi Beragama: Dari Indonesia untuk Dunia* (Yogyakarta: LKiS, 2019).

<sup>53</sup>Setia, *Kampanye Moderasi Beragama*.

<sup>54</sup>Elis Teti Rusmiati, 'Penguatan Moderasi Beragama di Pesantren untuk Mencegah Tumbuhnya Radikalisme', *Jurnal Abdi Moestopo*, 5.2 (2022).

<sup>55</sup>Mustaqim Hasan, 'Prinsip Moderasi Beragama dalam Kehidupan Berbangsa', *Jurnal Muftadiin*, 7.2 (2021).

<sup>56</sup>Zainal Abidin Bagir dan Jimmy M.I. Sormin, 'Epilog: Cukupkah Menjadi Moderat?', dalam *Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama: Suatu Tinjauan Kritis* (Jakarta: Gramedia, 2022), 168.

<sup>57</sup>Peter Beyer, 'Constitutional Privilege and Constituting Pluralism: Religious Freedom in National, Global, and Legal Context', *Journal for the Scientific Study of Religion*, 42.3 (2003).

Bertolak dari ragam tren kajian yang ada, riset ini hendak mengeksplorasi lebih jauh kekhawatiran Zainal Abidin Bagir dan Jimmy M.I. Sormin. Juga para peneliti yang melakukan tinjauan kritis, yang turut berkontribusi dalam buku *Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama*.<sup>58</sup> Jika dalam riset tersebut sampai pada kesimpulan bahwa munculnya moderasi beragama sehingga menjadi diskursus dominan adalah karena peran dari pemerintah untuk menempatkannya dalam program nasional, tesis ini mendiskusikan lebih jauh perihal aktor-aktor di balik besarnya gaung moderasi beragama. Sebuah ide yang turut diilhami oleh Peter Mandaville dan Melissa Nozell yang menilai bahwa beberapa tahun terakhir kebijakan melawan ekstremisme kekerasan tertarik untuk melibatkan aktor-aktor agama dalam proses diskusi, hingga implementasinya.<sup>59</sup>

#### **E. Kerangka Teori**

Jika dilacak jauh ke belakang, istilah radikal sebenarnya telah dipakai sejak abad ke-18, di mana sering dikaitkan dengan revolusi Prancis dan Amerika. Di abad ke-19 mengalami pergeseran, maknanya diperluas untuk merujuk pada agenda politik yang menganjurkan pembaruan sosial dan politik secara menyeluruh. Tidak sedikit partai politik yang menyebut diri mereka radikal, terutama dalam isu-isu seperti menganjurkan republikanisme. Pada abad ini istilah 'radikal' hampir sama terhormatnya dengan liberal. Orang yang menyebut dirinya sebagai radikal biasanya adalah orang-orang reformis; aktivis tanpa kekerasan.

---

<sup>58</sup>Riset yang dimuat dalam buku 'Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama' dilakukan oleh; Danial Sutami Putra, Donald Qomaidiasyah Tungkagi, Maufur, Suhadi Cholil, Trisno Subiakto Sutanto, Woro Wahyuningtyas, Zainal Abidin Bagir, dan Jimmy M.I. Sormin.

<sup>59</sup>Peter Mandaville dan Melissa Nazell, 'Engaging Religion and Religious Actors in Countering Violent Extremism', *United States Institute of Peace*, 2017, 3.

Mereka umumnya merujuk pada posisi politik liberal, anti-klerikal, pro-demokrasi, progresif, dan kontemporer. Dalam kurun waktu kurang dari satu abad, konsep radikal berubah cukup drastis; merangkul anti-liberal.<sup>60</sup> Perubahan ini merujuk pada muslim “radikal”<sup>61</sup> yang cenderung memiliki penafsiran Al-Qur’an secara literal dan berusaha berpegang erat pada model normatif berdasar teladan Nabi Muhammad. Di mana kegiatannya berkisar pada proyek intelektual, misionaris, politik, hingga tindak kekerasan.<sup>62</sup>

Karakter ini salah satunya diilustrasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ketika mendiskusikan karakter radikal. BNPT mengelompokkannya dalam tiga karakter: (a) radikal melalui gerakan dakwah,<sup>63</sup> (b) melalui gerakan politik,<sup>64</sup> (c) kelompok teroris yang dicirikan dengan tindak kekerasan dalam melancarkan misinya. Lebih lanjut, BNPT mengafirmasi bahwa pengelompokan karakter ini hanyalah secara garis besar. Dalam praktiknya, radikalisme bisa berupa kombinasi dari ketiganya: mengafirkan, ingin mengganti dasar negara dan melakukan tindak kekerasan, bahkan pembunuhan.<sup>65</sup> Secara spesifik BNPT membuat tipologi radikal di Indonesia dalam lima kategori:

<sup>60</sup>Schmid, ‘Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation’, 6-7.

<sup>61</sup>Kelompok yang mencari perubahan dramatis dalam masyarakat dan negara dengan penerapan syariah (hukum Islam).

<sup>62</sup>Greg Fealy, ‘Radical Islam in Indonesia: History, Ideology and Prospects’, in *Local Jihad: Radical Islam and Terrorism in Indonesia* (Australian Strategic Policy Institute, 2005), 13.

<sup>63</sup>Mereka adalah kelompok yang hanya memilih jalur dakwah dalam menyebarkan ideologinya. Kelompok ini bersikap intoleran terhadap perbedaan, menyalahkan (mengafirkan) praktik keyakinan agama lain, serta membidahkan kelompok yang tidak sepaham dengannya. Gerakan ini dianggap tidak cukup berbahaya, namun menjadi tahap awal dalam menanamkan sikap eksklusif dan intoleran.

<sup>64</sup>Dicirikan dengan keinginannya untuk mengganti ideologi negara dengan menegakkan Negara Islam atau sistem khilafah, dan biasanya menolak sistem demokrasi dan Pancasila.

<sup>65</sup>Suaib Tahir dkk., *Buku Panduan Pencegahan Radikalisme di Lingkungan Kerja BUMN Dan Perusahaan Swasta* (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kamar Dagang dan Industri (KADIN Indonesia), 2020), 14-15.

<b>Tipologi</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Contoh</b>
Radikal Gagasan	Kelompok yang secara gagasan radikal, namun tidak mendukung kekerasan.	Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jamaah Ansharut Tauhid (JAT)
Radikal Non-Terroris	Kelompok ini bergerak dalam bentuk residivis kelompok radikal non-terorisme, <i>gengsterian</i> atau vandalisme. Mereka memperjuangkan syariat Islam dengan cara melakukan kekerasan. Namun tidak memiliki misi untuk mengubah negara.	Front Pembela Islam (FPI)
Radikal Milisi	Kelompok milisi yang terlibat dalam konflik komunal seperti konflik Ambon dan Poso, namun tidak memiliki misi mengubah sistem negara.	Laskar Jihad, Laskar Jundullah, dan Laskar Mujahidin Indonesia
Radikal Separatis	Mempunyai tujuan untuk memisahkan diri dari Indonesia.	Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dan Negara Islam Indonesia (NII)
Radikal Terorisme	Mempunyai tujuan untuk menegakkan hukum-hukum Islam dengan melakukan aksi-aksi terorisme	Jamaah Islamiyah (JI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD)

Aktivitas Islam radikal biasanya cenderung mengadvokasi pengakuan konstitusional terhadap syariat sebagai aturan hukum yang harus diikuti umat Islam. Sebagian besar tidak secara formal menentang NKRI, namun menginginkan basisnya diubah--dari doktrin Pancasila yang netral agama menjadi Islam. Sebagian yang lain menginginkan sistem negara kekhalifahan dengan dalih sistem tersebut adalah bagian penting dari model asli masyarakat Islam.<sup>66</sup> Dalam sejarah peradaban manusia, agama menjadi sarana paling mudah menyulut emosi dan memproduksi konflik. Dalam bingkai pemikiran *mainstream* membicarakan

<sup>66</sup>Fealy, 'Radical Islam in Indonesia', 15-16.

agama berarti berbicara persoalan sakral; baik-buruk, benar-salah.<sup>67</sup> Tidak sedikit orang merasa bahwa tindakan kekerasan yang dilakukannya bukan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia, bahkan menganggap sebuah tugas suci agama dan memang diperintahkan Tuhan.<sup>68</sup>

Berangkat dari ragam aksi yang dilakukan kelompok-kelompok radikal ini, Kemenag kemudian melancarkan program moderasi beragama. Program tersebut selanjutnya dibaca ulang melalui skema ‘Analisis Wacana Kritis’ (selanjutnya ditulis AWK) yang ditawarkan Norman Fairclough:<sup>69</sup> berangkat dari teks (linguistik),<sup>70</sup> praktik diskursif (tradisi interpretatif),<sup>71</sup> hingga praksis sosial (sosiologi),<sup>72</sup> dapat diketahui bagaimana konstruksi wacana moderasi beragama hingga relasi kuasa yang terjadi di dalamnya. Pada prinsipnya AWK memang melihat sebuah teks (wacana) sebagai medium dominasi dan kuasa,<sup>73</sup> atau dalam

---

<sup>67</sup>M. Afif Anshori, ‘Mencari Titik Temu Agama-Agama di Ranah Esoterisme: Upaya Mengatasi Konflik Keagamaan’, *Analisis*, XII.2 (2012), 290.

<sup>68</sup>Ahmad Najib Burhani, *Agama, Kultur (In) Toleransi, dan Dilema Minoritas di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2020), 29.

<sup>69</sup>Fairclough melihat Analisis Wacana Kritis (AWK) bukan hanya perihal pilihan atau penerapan metode yang ada. Melainkan proses yang dipacu untuk mengonstruksi objek penelitian menjadi topik penelitian. AWK tertarik pada bagaimana bahasa dan wacana digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. Norman Fairclough, *Discourse and Social Change* (Cambridge: Polity Press, 1992), 169.

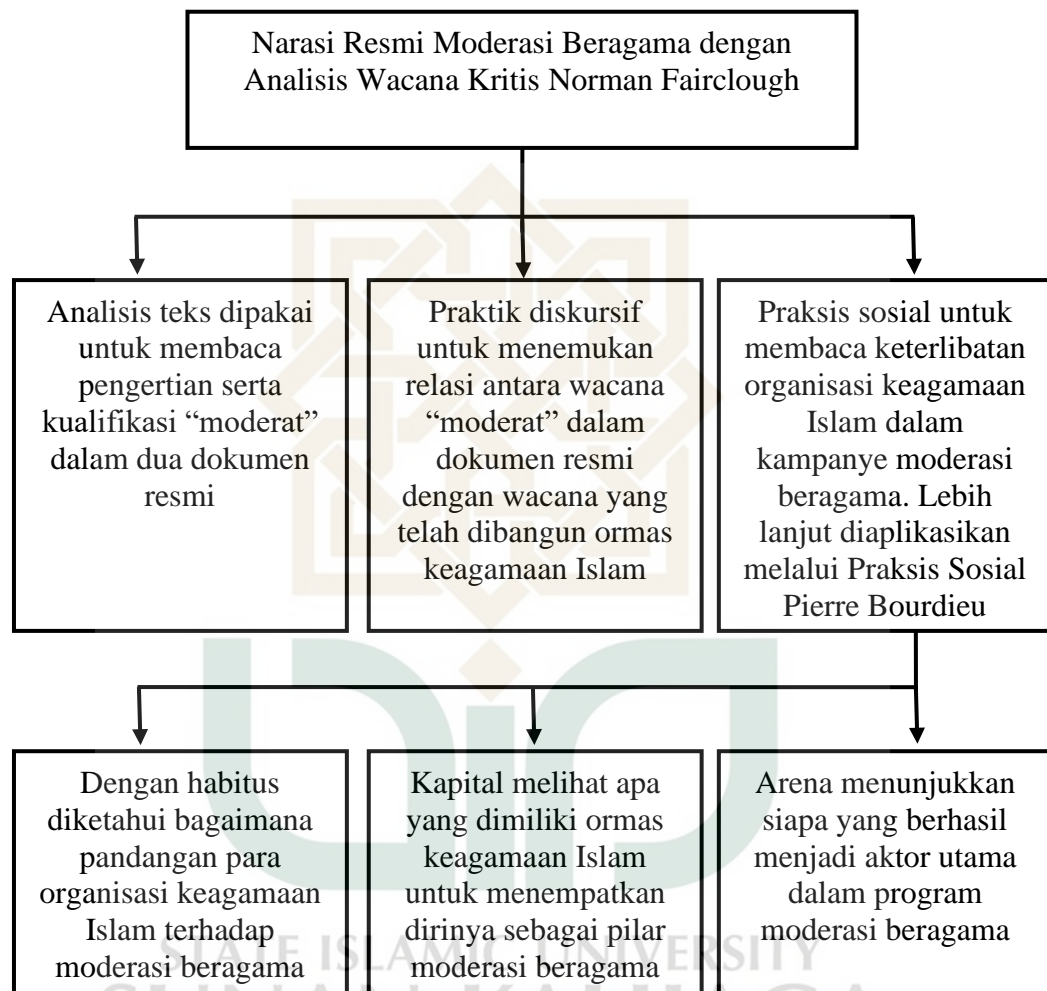
<sup>70</sup>Teks ditempatkan sebagai bentuk representasi sesuatu yang mengandung ideologi tertentu. Ia dibongkar secara linguistik untuk melihat bagaimana suatu realitas ditampilkan atau dibentuk. Bagaimana penulis mengonstruksi hubungannya dengan pembaca, dan bagaimana suatu identitas hendak ditampilkan.

<sup>71</sup>Praktik diskursif berhubungan dengan proses produksi dan konsumsi teks. Proses produksi melekat pada pengalaman, pengetahuan, kebiasaan, lingkungan sosial, kondisi, keadaan, konteks, dan sebagainya yang dekat pada diri pembuat teks. Sementara konsumsi teks bergantung pada pengalaman, pengetahuan, konteks sosial yang berbeda dari pembuat teks atau pada diri pembaca.

<sup>72</sup>Praksis sosial adalah diensi yang berhubungan dengan konteks di luar teks..

<sup>73</sup>Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim, ‘Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru’, dalam *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*, ed. Ariel Haryanto (Bandung: Mizan, 1996), 16.

bahasa Muhammad AS Hikam, “AWK selalu peka terhadap kuasa yang senantiasa hadir bersama wacana.”<sup>74</sup>



Berangkat dari skema Fairclough, dua dokumen resmi, *Moderasi Beragama* dan *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama* dibaca ulang dengan teori analisis teks dan praktik diskursif. Analisis teks digunakan untuk melihat bagaimana Kementerian Agama merumuskan moderasi beragama. Namun, titik tekan lebih diarahkan pada aspek ‘pengertian’ serta ‘kualifikasi’

<sup>74</sup>Muhammad AS. Hikam, *Demokrasi dan Civil Society* (Jakarta: LP3ES, 1996), 56.

moderat. Sedangkan praktik diskursif dipakai untuk melihat kedekatan antara wacana moderasi beragama yang dirumuskan Kemenag dengan wacana-wacana “moderat” yang telah dibangun ormas keagamaan Islam.

Kendati tesis ini mengadaptasi skema Fairclough, namun dalam analisis praksis sosial mengikuti pola dari teori habitus, modal (kapital), dan arena Pierre Bourdieu. Bourdieu yang memiliki rumus generatif dunia sosial ‘(Habitus x Modal) + Arena = Praksis’ menjadi alat bantu yang relevan untuk melihat relasi kuasa yang terjadi antara Kemenag selaku pemilik kebijakan dengan ormas keagamaan Islam selaku pendukung program moderasi beragama. Dengan habitus<sup>75</sup> dapat diketahui siapa saja organisasi keagamaan Islam yang memiliki pandangan serupa atau setuju dengan moderasi beragama. Modal<sup>76</sup> dipakai untuk membaca hal apa saja yang dimiliki ormas keagamaan Islam untuk menempatkan dirinya sebagai pilar moderasi beragama. Sedangkan arena<sup>77</sup> adalah konteks di mana terjadinya kontestasi antar ormas keagamaan Islam, yang selanjutnya melahirkan aktor utama dalam program moderasi beragama.

---

<sup>75</sup>Habitus merupakan struktur mental atau kognitif, kerangka penafsiran untuk memahami dan menilai realitas sekaligus penghasil praktik-praktik kehidupan. Habitus dapat diartikan nilai-nilai, pandangan benar-salah, baik-buruk, indah-tidak indah yang diserap manusia dari sekeliling dan pada tahap selanjutnya menjadi gaya hidup, perspektif, *world view*. Pierre Bourdieu, *Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste*, ed. Richard Nice (Cambridge: Harvard University Press), 170.

<sup>76</sup>Ketika berbicara modal, Bourdieu mengembangkan konsepsinya sendiri secara menarik. Bertolak dari Marx yang mengkategorikan bentuk modal dengan merujuk pada penguasaan ekonomi, Bourdieu, berangkat dari pemikirannya, bahwa kepentingan atau sumber daya yang dipertaruhkan dalam arena tidak mesti berbentuk materi kemudian menambah tiga aspek; sosial, budaya, dan simbolik. Bourdieu, *Distinction: A Social Critique*, 124.

<sup>77</sup>Secara terminologis, Bourdieu menuliskan: dalam terminologi analitik, sebuah ranah bisa didefinisikan sebagai sebuah jaringan, atau konfigurasi, hubungan-hubungan objektif antarberbagai posisi. Bourdieu, *Distinction: A Social Critique*, 226-227.

## F. Metode Penelitian

Sumber data utama dalam kajian ini berasal dari hasil penelitian pustaka.<sup>78</sup>

Dua dokumen resmi terbitan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, buku *Moderasi Beragama* dan *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama* menjadi pijakan paling awal sebagai bahan analisis untuk mendapat konsep utuh terkait konstruksi narasi moderasi beragama. Pada fase ini, ‘analisis teks’ dan ‘praktik diskursif’ ala Norman Fairclough diaplikasikan untuk melakukan pembacaan kepada dua dokumen resmi tersebut. Sebagai data pendukung, riset-riset dari peneliti sebelumnya—buku, tesis, artikel—tentu tidak dapat dinafikan perannya dalam membantu proses analisis. Di antara yang paling dekat adalah buku *Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama* yang telah membuka jalan untuk melakukan suatu tinjauan kritis atas program tersebut.

Selanjutnya, untuk melihat bagaimana proses diseminasi moderasi beragama dilakukan, penulis memanfaatkan data-data online dari media sosial. Selama periode riset penulis aktif mengamati gagasan dan kegiatan-kegiatan seremonial moderasi beragama yang dimuat dalam website resmi Kemenag, ormas keagamaan Islam, serta lembaga-lembaga terlibat. Di samping untuk mendapatkan data terkait bagaimana moderasi beragama didiseminasikan, juga sebagai upaya melacak siapa saja aktor-aktor yang berperan. Ini menjadi modal penting untuk melihat relasi kuasa dalam moderasi beragama. Perlu diakui bahwa apa yang digambarkan dalam tesis ini turut berangkat dari anjuran Talal Asad, agar melihat bagaimana kondisi historis dan relasi kuasa yang berkait-kelindan

---

<sup>78</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).



dalam fenomena keagamaan.<sup>79</sup> Dalam tahapan ini data dibaca dengan ‘Praksis Sosial’ Pierre Bourdieu.

## G. Sistematika Pembahasan

Diskusi dalam tesis ini dibagi menjadi enam bab yang terdiri dari; pertama, **Pendahuluan**. Bab ini menjelaskan beberapa hal penting meliputi (a) latar belakang persoalan mengapa mendiskusikan negara dan deradikalisasi keagamaan dengan fokus perhatian pada moderasi beragama, (b) rumusan persoalan penelitian, (c) tujuan dan kontribusi penelitian, (d) penelitian-penelitian terdahulu tentang moderasi beragama, baik yang sifatnya apresiatif maupun kritis, (e) kerangka teoritis sebagai alat bantu untuk menganalisis konstruksi wacana resmi dalam dokumen resmi moderasi beragama serta relasi kuasa yang dihadirkan, (f) metode penelitian, dan (g) sistematika pembahasan.

Selanjutnya, **Bab II** menyajikan konteks Indonesia di era Reformasi dengan perhatian khusus pada demokratisasi yang menyertainya. Bab ini melihat bahwa kran kebebasan yang diproduksi demokrasi turut berdampak pada semakin luasnya ruang gerak bagi kelompok konservatif untuk mengekspresikan keberagamaannya. Dibuktikan oleh beberapa kasus seperti terorisme yang terjadi secara berkala, diberlakukannya politik syariat, penolakan terhadap liberalisme Islam secara terang-terangan, gerakan 212, serta tumbuh suburnya *hate speech* atas nama agama.

---

<sup>79</sup>Argumentasi Asad bermula dari upayanya untuk mengkritik pendekatan Clifford Geertz. Dalam melakukan riset fenomena keagamaan--alih-alih mempersoalkan makna ajaran dan praktik, termasuk simbol-simbol dan ritualnya sebagaimana sering dilakukan Geertz. Talal Asad, ‘Anthropological Conceptions of Religion: Reflections on Geertz’, *Man: New Series*, 18.2 (1983), 237-259.

Serangkaian kasus yang menyertai Reformasi menghadirkan respon dari pemerintah Indonesia, yang selanjutnya dibahas dalam **Bab III**. Bab ini menginformasikan bahwa dalam mengatasi radikalisasi keagamaan pemerintah telah menerbitkan hukum anti-terorisme; mendirikan lembaga Detasemen Khusus (Densus) 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); serta memberikan kewenangan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk membubarkan ormas keagamaan radikal. Karena pendekatan yang ada dirasa masih belum cukup optimal, untuk melengkapinya, pemerintah mengadvokasi gagasan moderasi beragama oleh Kementerian Agama (Kemenag).

Gagasan moderasi beragama didiskusikan lebih lanjut pada **Bab IV**. Dalam bab ini fokus diskusi diarahkan pada eksplorasi konstruksi wacana resmi moderasi beragama melalui buku *Moderasi Beragama dan Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama*. Namun sebelum mendiskusikan ini, fungsi ideologis Kemenag di era Reformasi serta program moderasi beragama dibahas lebih dahulu. Berangkat dari sajian ini, konstruksi wacana moderasi beragama dilihat melalui dua poin, yaitu, pengertian dan klasifikasi “moderat” menurut program moderasi beragama.

Setelah mendiskusikan konstruksi wacana resmi moderasi beragama, diskusi di **Bab V** mengeksplorasi terjadinya relasi kuasa di balik program moderasi beragama. Secara khusus diskusi ini ditujukan untuk memperlihatkan bahwa NU dan Muhammadiyah adalah pilar moderasi beragama, dengan menempatkan NU sebagai aktor utama. Namun sebelum sampai pada pembahasan

ini, terlebih dahulu disajikan bentuk dukungan untuk program moderasi beragama yang datang dari berbagai ormas keagamaan Islam. Dibuktikan melalui artikel dan berita yang terbit pada masing-masing website resminya.

Terakhir, **Bab VI** berisi kesimpulan dari seluruh hasil diskusi dalam tesis.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Sejak akhir periode Suharto (Mei 1998) Indonesia melakukan transisi menuju demokrasi yang mengandung konsekuensi terbukanya ruang bagi lebih banyak kelompok untuk memperjuangkan aspirasinya. Indonesia menyaksikan pertumbuhan secara stabil dari varietas islamisme konservatif yang baru dan tegas. Diekspresikan paling jelas dalam proliferasi terorisme, politik syariat, perlawanan terhadap liberalisme Islam, gerakan 212, hingga tumbuh suburnya *hate speech* atas nama agama. Pemerintah Indonesia mengambil beberapa upaya penanganan dengan dibentuknya Detasemen Khusus (Densus) 88, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta ditetapkannya Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pembubaran ormas keagamaan radikal. Namun pemerintah Indonesia tampaknya menyadari bahwa pendekatan yang ada masih belum cukup optimal; medan pertempuran bukan hanya bersifat militeristik dan keamanan, melainkan juga menyangkut budaya dan ideologis. Dari kesadaran tersebut selanjutnya pemerintah--melalui Kemenag--mengadvokasi gagasan moderasi beragama dan ditetapkan sebagai salah satu dari arah kebijakan negara dalam RPJMN 2020-2024. Moderasi beragama dimaksudkan untuk membangun karakter sumber daya manusia Indonesia yang moderat: yang berpegang teguh pada esensi ajaran

dan nilai agama, berorientasi menciptakan kemaslahatan umum, serta menjunjung tinggi komitmen kebangsaan.

2. Moderasi Beragama menerbitkan dua dokumen utama, yaitu buku *Moderasi Beragama* yang dalam tesis ini ditulis sebagai Buku Induk dan *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama* yang ditulis sebagai *Roadmap*. Dalam dokumen tersebut dapat diketahui bagaimana Kemenag sebagai *leading sector* moderasi beragama merumuskan ulang pengertian “moderat” dengan memperhatikan konteks ke-Indonesia-an. “Moderat” ditempatkan sebagai cara pandang serta praktik beragama yang mampu melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum. Kemenag juga menentukan indikator atau standar keberhasilan moderasi beragama yang terejawantah dalam empat hal: *pertama*, sikap penerimaan terhadap konstitusi yang telah disepakati. Dibuktikan dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang sejalan dengan butir-butir Pancasila dan UUD 1945, serta mengakui bahwa NKRI bukanlah negara teokratis maupun sekuler sehingga tidak memaksakan satu agama sebagai ideologi negara; *kedua*, membudayakan toleransi. Toleransi yang dimaksud moderasi beragama adalah bentuk toleransi kepada antar-agama dan intra-agama yang bukan sekadar menghargai dan menghormati pemeluk keyakinan yang berbeda, melainkan juga turut aktif melakukan komunikasi, membangun kebersamaan dan kerja sama dalam kehidupan sosial budaya. Hanya saja, moderasi beragama mengecualikan untuk bersikap toleran terhadap kelompok-kelompok radikal-ekstremisme; *ketiga*, merawat budaya damai anti-kekerasan. “Moderat” dalam

kacamata moderasi beragama ditandai dengan pemahaman bahwa agama adalah sarana untuk mencapai kedamaian dan kasih sayang, bukan sebagai alasan untuk mencegah kemunkaran dengan cara kekerasan atau diskriminasi; *keempat*, menerima budaya indigenos. Dalam hal ini individu atau kelompok yang disebut “moderat” adalah mereka yang menunjukkan tradisi keagamaan yang tidak kaku. Ditandai dengan kesediaan untuk menerima praktik dan perilaku beragama yang tidak semata-mata menekankan pada kebenaran normatif.

3. Pasca terbentuknya konstruksi wacana resmi moderasi beragama, pemerintah secara serius melakukan diseminasi dengan menggandeng beberapa elemen masyarakat dan pemerintahan; termasuk ormas keagamaan Islam moderat yang diyakini sebagai salah satu bagian penting untuk menahan tumbuh suburnya kelompok radikal-ekstremisme. Dari data-data yang ditemukan dalam website resmi masing-masing ormas keagamaan Islam, sedikitnya ada 10 ormas yang menunjukkan respon positif atas hadirnya program moderasi beragama. Mereka turut serta membumikan gagasan moderasi beragama dengan mempublikasikan beberapa artikel, juga dengan melaksanakan beberapa kegiatan seremonial. Bahwa program diplomasi publik di era Reformasi hanya akan berhasil jika mendapat dukungan, otoritas, dan legitimasi dari kelompok atau organisasi dengan keanggotaan yang besar, menjadikan negara—secara langsung ataupun tidak—membangun aliansi dengan kelompok-kelompok tersebut. Akibatnya, meski respon positif bahkan dukungan ditunjukkan oleh banyak ormas keagamaan Islam, ada beberapa

yang kemudian mendapat tempat istimewa. NU dan Muhammadiyah yang dalam sejarahnya telah memainkan peran penting tidak hanya dalam kehidupan Islam, melainkan juga dalam kehidupan politik dan sosial, adalah dua kelompok yang ditempatkan sebagai pilar moderasi beragama. Pada tingkat wacana, indikator-indikator “moderat” yang ditetapkan Kemenag adalah prinsip yang sejak lama diperjuangkan dua ormas arus utama tersebut. NU dan Muhammadiyah, masing-masing telah merumuskan wacana Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan untuk memantapkan peran Indonesia sebagai negara yang berkontribusi terhadap pengembangan demokrasi dan upaya bina damai. Oleh karenanya, untuk menghindari moderasi beragama dipandang sebagai inisiatif yang bersaing, Kemenag perlu bekerja dengan NU dan Muhammadiyah untuk berkoordinasi serta memutuskan platform bersama. Hanya saja, keberhasilan NU dalam mengkooptasi serta mengontrol wacana keberagamaan dari *Conservative Turn* menuju *Traditionalist Turn*, juga aliansi yang dibangun dengan Joko Widodo berdampak pada diperolehnya posisi yang lebih strategis. Pada praktiknya, meski NU dan Muhammadiyah dijadikan sebagai *best practice* bagi moderasi beragama dalam melakukan *counter* terhadap radikalisme serta menggali kisah sukses dalam menguatkan paham moderat, NU sebagai kelompok tradisionalis memiliki peran dan akses yang lebih besar dalam kampanye moderasi beragama. Di samping jabatan-jabatan dalam Kemenag yang merupakan sektor penting diseminasi moderasi beragama banyak dipegang NU, sejak penyusunan dokumen resmi moderasi beragama, intelektual NU diberikan ruang yang lebih besar untuk ikut andil.

Adapun preferensi paling jelas dapat dilihat misalnya pada *Annual International Conference on Islamic Studies*, di mana menempatkan para intelektual NU untuk berbicara seputar tema-tema perdamaian serta dukungan negara kepada *G20 Religion Forum*.

## **B. Saran**

Tesis ini telah berusaha memahami konstruksi wacana dan relasi kuasa dalam moderasi beragama. Dengan mencoba melengkapi narasi dalam buku *Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama* tesis ini menawarkan pandangan bahwa pada setiap kebijakan selalu menghadirkan pihak-pihak yang diuntungkan. Hanya saja, apa yang telah didiskusikan dalam tesis ini masih menyisakan banyak kekurangan yang perlu dielaborasi lebih mendalam, di antaranya: *Pertama*, konstruksi wacana lebih banyak ditekankan pada pembacaan atas teks. Sebenarnya penekanan ini masih belum cukup kuat untuk menyimpulkan narasi yang dibangun dalam program moderasi beragama. Penelitian berikutnya diharapkan dapat memberi atensi khusus untuk melakukan pembacaan di balik teks, seperti latar belakang dari para kontributor dokumen resmi serta melacak lebih jauh referensi-referensi yang dipakai. *Kedua*, sumber data yang digunakan untuk melihat proses diseminasi moderasi beragama masih lebih banyak didominasi oleh publikasi dari media sosial. Kelemahan ini terjadi salah satu faktor utamanya adalah keterbatasan waktu dan sumber dana.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku, Disertasi, Tesis, Artikel

- Achmad, Mukhsin, dkk. 'From Personal to Communal: The Conflict among Sunni-Shiite in Sampang, East Java'. *Sunan Kalijaga: International Journal of Islamic Civilization*, 2.1 (2019).
- Afwadzi, Benny, dan Miski, 'Religious Moderation in Indonesian Higher Educations: Literature Review', *Ulul Albab*, 22.2 (2017).
- Ahid, Nur. 'Menyingkap Serpihan Pemikiran Dialogis-Kritis', dalam *Menatap Wajah Islam Indonesia*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Ahmad, Mukri Aji, dkk. *Menelusuri Jejak Islam Nusantara*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020.
- Ahmad, Rumadi. 'Apakah Indonesia Kurang Syar'i?', dalam *NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi? Tanggapan 21 Pakar terhadap Gagasan Denny JA*, ed. Satrio Arismunandar. Jakarta: Ceraf Budaya Indonesia, 2019.
- Aji, Ahmad Mukri, 'Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Analisis terhadap UU No, 15 dan 16 Tahun 2003 Berdasarkan Teori Hukum)', *Jurnal Cita Hukum*, 1.1 (2013).
- Akhyari, M. Kamil, 'Benarkah NU Moderat?', dalam *Nasionalisme dan Islam Nusantara*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2015.
- Al-Qurtuby, Sumanto. 'Sejarah Politik Politisasi Agama dan Dampaknya di Indonesia', *Maarif*, 13.2 (2018).
- , 'Sinkretisme "Islam Jawa": Dialog Agama dan Kultur Lokal', dalam *Agama dan Kepercayaan Agama*, ed. Sumanto Al-Qurtuby dan Tedi Kholiludin. Semarang: eLSA Press, 2019.
- Amar, Abu. 'Pendidikan Islam Wasathiyah Ke-Indonesia-an', *Al-Insiroh*, 2.2 (2018).
- Amin, Kamaruddin. 'Sambutan Direktur Jenderal Pendidikan Islam', dalam *Moderasi Beragama: Dari Indonesia untuk Dunia*, ed. Arifin Ahmala. Yogyakarta: LKiS, 2019.

- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. London: Harvard University Press, 2008.
- Anshori, M. Afif. 'Mencari Titik Temu Agama-Agama di Ranah Esoterisme: Upaya Mengatasi Konflik Keagamaan', *Analisis*, XII.2 (2012).
- AR, M. Taufiq. 'Netral-Aktif: Sikap Elegan dalam Politik Kebangsaan Muhammadiyah', dalam *Politik Inklusif Muhammadiyah: Narasi Pencerahan Islam untuk Indonesia Berkemajuan*, ed. Ridho Al-Hamdi, dkk. Yogyakarta: UMY Press, 2019.
- Arianti, V. 'Jemaah Islamiyah After the 2002 Bali Bombings', *Counter Terrorist Trends and Analyses*, 14.5 (2022).
- Arifinsyah, dkk. 'The Urgency of Religious Moderation in Preventing Radicalism in Indonesia', *Esensia*, 21.1 (2020).
- Arrobi, Moh Zaki. 'Muhammadiyah sebagai Nobel Peace Laureate, Mengapa Tidak?', dalam *Politik Inklusif Muhammadiyah: Narasi Pencerahan Islam Untuk Indonesia Berkemajuan*, ed. Ridho Al-Hamdi, dkk. Yogyakarta: UMY Press, 2019.
- Arsyad, Muhammad Iqbal. 'Perjumpaan Meretas Stigma Negatif Antar Agama', dalam *Menyalakan "Lilin" Dialog Antar Agama*. Yogyakarta: Litera, 2020.
- Asad, Talal. 'Anthropological Conceptions of Religion: Reflections on Geertz', *Man: New Series*, 18.2 (1983).
- Aspar, Muhammad. *Wacana Penghapusan Koter: Pengembalian Fungsi Teritorial dari TNI ke Pemerintah Daerah*. Surabaya: PuSDeHAM, 2003.
- Azizah, Lutfatul. *Refleksi Moderasi Beragama dalam Penyelesaian Konflik Ahmadiyah Lombok*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.
- Azra, Azyumardi. 'Indonesia Islam, Mainstream Muslims and Politics', dalam *Taiwanese and Indonesian Islamic Leaders Exchange Project*. Taipei: The Asia Foundation in Taiwan, 2006.
- . *Relevansi Islam Wasathiyah*, ed. Idris Thaha. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2020.
- . *Renaissance Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana dan Kekuasaan*. Bandung: Rosdakarya, 2000.

- . ‘Terorisme, Radikalisme, dan Fundamentalisme’, *Siasat: Journal of Religion, Social, Cultural and Political Sciences*, 2.1 (2018).
- Asrudin, Azwar, dan Mirza Jaka Suryana. ‘Dwifungsi TNI dari Masa ke Masa’, *Academia Praja*, 4.1 (2021).
- Bagir, Zainal Abidin. ‘Belajar dari Delapan Hijrah: Ekstremisme, Perdamaian, dan Demokrasi Indonesia’, dalam *Keluar dari Ekstremisme: Delapan Kisah ‘Hijrah’ dari Kekerasan Menuju Binadamai*, ed. Ihsan Ali Fauzi dan Dyah Ayu Kartika. Jakarta: PUSAD Paramadina, 2018.
- , ‘Membaca Beragam Wajah Islam Indonesia’, dalam *Conservative Turn: Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme*. Bandung: Mizan Publika, 2014.
- , ‘Religion, Democracy, and Citizenship, Twenty Years after Reformasi’, dalam *Indonesian Pluralities: Islam, Citizenship, and Democracy*, ed. Robert W. Hefner dan Zainal Abidin Bagir. Notre Dame Amerika: University of Notre Dame, 2021.
- Bagir, Zainal Abidin, dan Jimmy M.I. Sormin. ‘Epilog: Cukupkah Menjadi Moderat?’, dalam *Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama: Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta: Gramedia, 2022.
- Barton, Greg, Ihsan Yilmaz dan Nicholas Morieson. ‘Religious Pro-Violence Populism in Indonesia: The Rise and Fall of a Far-Right Islamist Civilisationist Movement’, *Religions*, 12.397 (2021).
- Basyir, Kunawi. ‘Perjumpaan Agama dan Budaya: Melacak Konsep dan Ideologi Gerakan Keagamaan di Indonesia’, *Kalam*, 11.2 (2017).
- Beyer, Peter. ‘Constitutional Privilege and Constituting Pluralism: Religious Freedom in National, Global, and Legal Context’, *Journal for the Scientific Study of Religion*, 42.3 (2003).
- Biyanto. ‘Muhammadiyah dan Problem Hubungan Agama-Budaya’, *Islamica*, 5.1 (2010).
- BNPT. *Modul Perkembangan Terorisme dan Pencegahan Terorisme di Daerah* (Sentul, 2013).
- . *Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020-2024* (Jakarta, 2020).

- Bourdieu, Pierre. *Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste*, ed. Richard Nice. Cambridge: Harvard University Press.
- Brown, Wendy, dan Rainer Forst. *The Power of Tolerance: A Debate*, ed. Luca di Blasi dan Christoph F. E. Holzhey. New York: Columbia University Press, 2014.
- Bruinessen, Martin Van. 'Kelangsungan Pemikiran Muslim Liberal dan Progresif di Indonesia', dalam *Conservative Turn: Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme*. Bandung: Mizan Publika, 2014.
- . 'Perkembangan Kontemporer Islam Indonesia dan "Coservative Turn" Aal Abad Ke-21', dalam *Conservative Turn: Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme*. Bandung: Mizan Publika, 2014.
- Budiyono. 'Politik Hukum Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia', *Yustisia*, 2.2 (2013).
- Burhani, Ahmad Najib. *Agama, Kultur (In) Toleransi, dan Dilema Minoritas di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press, 2020.
- . 'Between Social Services and Tolerance: Explaining Religious Dynamics in Muhammadiyah', *ISEAS*, 11 (2019).
- . 'Islam Nusantara as a Promising Response to Religious Intolerance and Radicalism', *ISEAS*, 21 (2018).
- Choliq, Mohamad Abdul. 'Aplikasi Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough dalam Buku Wasatiyyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama Karya M. Quraish Shihab' (Uin Sunan Ampel Surabaya, 2022).
- Darmadi. 'Peace Journalism dan Moderasi Beragama dalam Mengcounter Narasi Radikalisme', *Jicoms: Journal of Islamic Communication and Media Studies*, 1.1 (2021).
- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 137 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Kampung Moderasi Beragama Tahun 2023* (Jakarta, 2023).
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam. *Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama* (Jakarta, 2021).
- Fairclough, Norman. *Discourse and Social Change*. Cambridge: Polity Press, 1992.
- Faqihuddin, Ahmad. 'Islam Moderat Di Indonesia', *Al-Risalah*, 12.1 (2021).

- Fealy, Greg. 'Radical Islam in Indonesia: History, Ideology and Prospects', dalam *Local Jihad: Radical Islam and Terrorism in Indonesia*. Australian Strategic Policy Institute, 2005.
- Feener, Michael R. *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia*, ed. Anver M. Emon, Clark Lombardi, dan Lynn Welchman. New York: Oxford University Press, 2013.
- Formichi, Chiara. 'Violence, Sectarianism, and the Politics of Religion: Articulations of Anti-Shi'a Discourses in Indonesia', *Indonesia*, 98 (2014).
- George, Cherian. *Pelintiran Kebencian: Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya Bagi Demokrasi*, ed. Tim PUSAD Paramadina dan IIS UGM (Jakarta: PUSAD Yayasan Paramadina, 2017).
- Ghazali, Abdul Moqsith. 'Metodologi Islam Nusantara', dalam *Islam Nusantara: dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan*, ed. Akhmad Sahal dan Munawir Aziz. Mizan, 2015.
- Golebiewski, Daniel. 'Religion and Globalization: New Possibilities, Furthering Challenges' (E-International Relations, 2014).
- Golose, Petrus R. *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: YPKIK, 2010.
- Hasan, Mohammad. *Moderasi Islam Nusantara (Studi Konsep Dan Metodologi)*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017.
- Hasan, Mustaqim. 'Prinsip Moderasi Beragama dalam Kehidupan Berbangsa', *Jurnal Mubtadiin*, 7.2 (2021).
- Hasan, Noorhaidi. 'Islam in a Changing Global Context: Rethinking Fiqh Reactualization and Public Policy'. Surakarta: AICIS2021, 2021.
- , 'Salafism in Indonesia: Transnational Islam, Violent Activism, and Cultural Resistance', dalam *Routledge Handbook of Contemporary Indonesia*. London dan New York: Routledge, 2018.
- Hasan, Nor. *Persentuhan Islam dan Budaya Lokal: Mengurai Khazanah Tradisi Masyarakat Populer*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.
- Hasyim, Syafiq dan Norshahril Saat. 'Indonesia's Ministry Of Religious Affairs Under Joko Widodo', *ISEAS*, 13 (2020).

- Hasyim, Syafiq. 'Commanding Right and Forbidding Wrong: The Rising Influence of Muslim Mainstream Groups', *ISEAS*, 78 (2021).
- . 'Jokowi's Moderasi Beragama: Challenge and Opportunity', *ISEAS*, 149 (2021).
- Hefner, Robert W. 'Muslim Democrats and Islamist Violence in Post-Soeharto Indonesia', dalam *Remaking Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization*, ed. Robert W. Hefner. New Jersey: Princeton University Press, 2005.
- . 'The Politics and Ethics of Social Recognition and Citizenship in a Muslim-Majority Democracy', dalam *Indonesian Pluralities: Islam, Citizenship, and Democracy*, ed. Robert W. Hefner dan Zainal Abidin Bagir. Notre Dame Amerika: University of Notre Dame, 2021.
- Hefni, Wildani. 'Fikih Moderasi Beragama: Humanisme Keberagamaan dalam Nalar Kehidupan Kontemporer di Indonesia', dalam *Kontestasi Nalar Keberagamaan Kontemporer: Dari Konstruksi Identitas menuju Koeksistensi Sosial*, ed. Wildani Hefni dkk. Yogyakarta: LKiS, 2021.
- Hidayatullah, Moch. Syarif, dan Abdullah. *Kontestasi Ideologi Islam Wasathiyah dan Islam Kafah di Media Online*. Jakarta, 2020.
- Hidayatullah, Syarif. *Menakar 'Azas Tunggal' Pancasila Pasca Reformasi*. Yogyakarta, 2012.
- Hikam, Muhammad A.S. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES, 1996.
- . *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2016.
- Hilmy, Masdar. 'Cetak Biru Moderasi Beragama: Urgensi Panduan Normatif dan Aplikatif', dalam *Moderasi Beragama: Dari Indonesia untuk Dunia*, ed. Ahmala Arifin. Yogyakarta: LKiS, 2019.
- . 'Quo-Vadis Islam Moderat Indonesia? Menimbang Kembali Modernisme Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah', *MIQOT*, XXXVI.2 (2012).
- Hoefl, Gabriel. 'Soft Approaches to Counter-Terrorism: An Exploration of the Benefits of Deradicalization Programs' (International Institute for Counter-Terrorism, 2015).
- Husna, Ulfatul. 'Moderasi Beragama di SMA Negeri 1 Krembung-Sidoarjo, Suatu Pendekatan Pendidikan Agama Islam dalam Menghadapi Tantangan Ekstrimisme' (Uin Sunan Ampel Surabaya, 2020).

- Ichwan, Moch. Nur, dan Ahmad Muttaqin. *Agama dan Perdamaian: Dari Potensi menuju Aksi*. Yogyakarta: CR-Peace, 2012.
- Ichwan, Moch Nur. 'MUI, Gerakan Islamis, dan Umat Mengambang', *Maarif*, 11.2 (2016).
- . 'Official Reform of Islam: State Islam and the Ministry of Religious Affairs in Contemporary Indonesia, 1966-2004' (Tilburg University, 2006).
- . 'The Politics of Shari'atization: Central Governmental and Regional Discourses of Shari'a Implementation in Aceh', dalam *Islamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Institutions*, ed. Michael Feener dan Mark Cammack. Boston: Harvard University Press, 2007.
- . 'Towards a Puritanical Moderate Islam: The Majelis Ulama Indonesia and the Politics of Religious Orthodoxy', dalam *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the 'Conservative Turn'*, ed. Martin Van Bruinessen. Pasir Panjang, Singapore: ISEAS, 2013.
- Institute for Policy Analysis of Conflict, *Countering Violent Extremism in Indonesia: Need for a Rethink*, 2014.
- JA, Denny. 'NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?, Seri Renungan Singkat Seputar Isu Pilpres 2019', dalam *NKRI Bersyariah atau Ruang Publik Yang Manusiawi? Tanggapan 21 Pakar terhadap Gagasan Denny JA*, ed. Satrio Arismunandar. Jakarta: Cerah Budaya Indonesia, 2019.
- . *NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?*. Jakarta: Cerah Budaya Indonesia, 2019.
- Jamarudin, Ade, dkk. 'Implementing Religious Moderation Using the Perspective of the Qur'an' (KnE Social Sciences: International Conference: Transdisciplinary Paradigm on Islamic Knowledge, 2022).
- Jones, Sidney. 'New Order Repression and the Birth of Jemaah Islamiyah', dalam *Soeharto's New Order and Its Legacy: Essays in Honour of Harold Crouch*, ed. Edward Aspinall dan Greg Fealy (ANU Press).
- Jura, Demy. 'Religious Moderation: An Approach of Religious Life in Indonesia', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1.10 (2021).
- Kahmad, Dadang. 'Wasathiyah Islam: Makna dan Kontektualisasi dalam Membangun Peradaban Ummat dan Bangsa' (Kampus ITBAD, 2017).

- Kamali, Mohammad Hashim. *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah*. New York: Oxford University Press, 2015.
- Kato, Hisanori. 'The Islam Nusantara Movement in Indonesia', dalam *Handbook of Islamic Sects and Movements*, ed. Muhammad Afzal Upal dan Carole M. Cusack. Leiden; Boston: Brill, 2021.
- Kawangung, Yudhi. 'Religious Moderation Discourse in Plurality of Social Harmony in Indonesia', *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 3.1 (2019).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Laporan Data Pegawai Kementerian Agama* (Jakarta, 2020).
- . *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- . *Tanya Jawab Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Khilmi, Erfina Fuadatul. 'Pembentukan Peraturan Daerah Syari'ah dalam Perspektif Hukum Tata Negara Pascareformasi', *Lentera Hukum*, 5.1 (2018).
- Khoiruddin, M. Arif. 'Agama dan Kebudayaan Tinjauan Studi Islam', *IAIT Kediri*, 26.1 (2015).
- Kruglanski, Arie W., dkk. 'The Psychology of Radicalization and Deradicalization: How Significance Quest Impacts Violent Extremism', *Advances in Political Psychology*, 35.1 (2014).
- Kusman, Airlangga Pribadi. 'NKRI Bersyariah dan Ruang Publik Inklusif dalam Pusaran Kekuasaan Indonesia Pasca-Otoritarianisme', dalam *NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi? Tanggapan 21 Pakar terhadap Gagasan Denny JA*, ed. Satrio Arismunandar. Jakarta: Cerah Budaya Indonesia, 2019.
- Latif, Yudi, dan Idi Subandy Ibrahim. 'Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru', dalam *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*, ed. Ariel Haryanto. Bandung: Mizan, 1996.
- Latif, Yudi. *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad Ke-20*. Jakarta: Democracy Project, 2012.



- . ‘Revitalisasi Pancasila di Tengah Dua Fundamentalisme’, *Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial*, 5.1 (2016).
- LibForAll Foundation. *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, ed. Abdurrahman Wahid. Jakarta: Gerakan Bhinneka Tunggal Ika, Wahid Institute, dan Maarif Institute, 2009.
- Malik, Abdul, dan Busrah, ‘Relasi Pemerintah dan Akademisi dalam Isu Moderasi Beragama di Indonesia’, *Substantia*, 23.2 (2021).
- Mamdani, Mahmood. ‘Good Muslim, Bad Muslim: A Political Perspective on Culture and Terrorism’, *American Anthropologist*, 104.3 (2002).
- Mandaville, Peter, dan Melissa Nazell. ‘Engaging Religion and Religious Actors in Countering Violent Extremism’, *United States Institute of Peace*, 2017.
- Maufur. ‘Menakar Moderasi Beragama dari Perspektif Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan’, dalam *Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama: Suatu Tinjauan Kritis*, ed. Zainal Abidin Bagir dan Jimmy M.I. Sormin. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2022.
- Mawardi, Irvan. ‘Memperkuat Pilar Keadilan untuk Indonesia Berkeadaban’, dalam *Politik Inklusif Muhammadiyah: Narasi Pencerahan Islam untuk Indonesia Berkemajuan*, ed. Ridho Al-Hamdi, dkk. Yogyakarta: UMY Press, 2019.
- Menchik, Jeremy, dan Katrina Trost. ‘A “Tolerant” Indonesia? Indonesian Muslims in Comparative Perspective’, dalam *Routledge Handbook of Contemporary Indonesia*, ed. Robert W. Hefner. London dan New York: Routledge, 2018.
- Menchik, Jeremy. ‘Missionaries, Modernists and the Origins of Intolerance in Islamic Institutions’, dalam *2011 APSA Meeting* (2011).
- Meuleman, Johan. ‘Between Unity and Diversity: The Construction of the Indonesian Nation’, *European Journal of East Asian Studies*, 5.1 (2006).
- Mudhoffir, Abdil Mughis. ‘Islamic Populism and Indonesia’s Illiberal Democracy’, dalam *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?*, ed. Thomas Power dan Eve Warburton. Terrace: ISEAS, 2020.
- Muhtada, Dani. ‘Perda Syariah di Indonesia: Penyebaran, Problem, dan Tantangannya’. Semarang, 2014.

- Muhtadi, Burhanuddin. 'Violent Ekstremism dalam Sudut Pandang Studi Agama', dalam *Asking Sensitive Questions: Panduan Pelaksanaan Survei dengan Tema Tindakan Ekstrem Berbasis Agama dan Non-Agama*. Centre for Strategic and International Studies, 2019.
- Muhtar, Zainal. 'Eksistensi Densus 88: Analisis Evaluasi dan Solusi terkait Wacana Pembubaran Densus 88', *Supremasi Hukum*, 3.1 (2014).
- Muridan, dan Nurma Ali Ridlwan. *Islam: Deradikalisasi dan Wacana Media*. Banyumas: Rizquna, 2020.
- Najib, Muhammad Ainun, dan Ahmad Khairul Fata. 'Islam Wasathiyah dan Kontestasi Wacana Moderatisme Islam di Indonesia', *Theologia*, 31.1 (2020).
- Niam, Zainun Wafiqatun. 'Konsep Islam Wasathiyah sebagai Wujud Islam Rahmatan Lil'alamin: Peran NU dan Muhammadiyah dalam Mewujudkan Islam Damai di Indonesia', *Palita*, 4.2 (2019).
- Nugroho, Heru. 'Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia', *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1.1 (2012).
- Nuraniyah, Nava. 'Divided Muslims: Militant Pluralism, Polarisation and Democratic Backsliding', dalam *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?*, ed. Thomas Power dan Eve Warburton. Terrace: ISEAS, 2020.
- Nursalim, Muh. 'Politik Hukum dalam Amandemen Pasal 29 UUD 1945: Telaah Terhadap Upaya Penerapan Syari'ah Islam di Indonesia', *UNISIA*, XXX.64 (2007).
- Peel, J.D.Y. 'Context, Tradition, and the Anthropology of World Religious', dalam *Christianity, Islam, and Orisa-Religion*. California: University of California Press.
- Popper, Karl. *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Porter, Donald J. *Managing Politics and Islam in Indonesia*. London dan New York: Routledge Curzon, 2002.
- Presiden Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Peraturan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan* (Jakarta, 2017).

- . *Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*, 2020.
- . *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta, 2015).
- . *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama* (Jakarta, 2015).
- Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. *Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan 9* (Jakarta, 2018).
- Rabasa, Angel M. 'Southeast Asia: Moderate Tradition and Radical Challenge', dalam *The Muslim World After 9/11*, ed. Angel M. Rabasa. California: Rand Corporation, 2004.
- Rahem, Zaitur. 'Ajaran Moderatisme Beragama pada Tradisi Ngunjeng Tandhe' (Annual Conference for Muslim Scholars, 2022).
- Ridwan, Nur Khalik, dkk. *Gerakan Kultural Islam Nusantara*, ed. Jibril FM, dkk. Yogyakarta: Jamaah Nahdliyin Mataram (JNM) bekerjasama dengan Panitia Mukhtar NU ke-33, 2015.
- Rizky, Alif Alvian, dan Irfan Ardhani. 'The Politics of Moderate Islam in Indonesia: Between International Pressure and Domestic Contestations', *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 61.1 (2023).
- Rohman, M. Saifullah. 'Dinamika Implementasi Kebijakan Keagamaan di Indonesia', *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 20.2 (2018).
- Ropi, Ismatu. 'Kata Pengantar', dalam *Konstruksi Moderasi Beragama, Catatan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2021.
- . *Religion and Regulation in Indonesia*. Gateway East, Singapore: Palgrave Macmillan, 2017.
- Rosyad, Rifki. 'Urgensi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam melalui Media Digital', dalam *Kampanye Moderasi Beragama: Dari Tradisional menuju Digital*. Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati, 2021.
- Rusmiati, Elis Teti. 'Penguatan Moderasi Beragama di Pesantren untuk Mencegah Tumbuhnya Radikalisme', *Jurnal Abdi Moestopo*, 5.2 (2022).

- Saat, Norshahril, dan Aninda Dewayanti, 'Jokowi's Management of Nahdlatul Ulama (NU): A New Order Approach?', *ISEAS*, 1 (2020).
- Sahasrad, Herdi, dan Al Chaidar. *Fundamentalisme, Terorisme dan Radikalisme: Perspektif atas Agama, Masyarakat dan Negara*. Jakarta: Freedom Foundation & Centre for Strategic Studies–University of Indonesia, 2017.
- Saiya, Nilay. 'Religion, Democracy and Terrorism', *Terrorism Research Initiative*, 9.6 (2015).
- Salamah, Ummu, dan Reinaldo Rianto. 'Perda Syariah dalam Otonomi Daerah', *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, 2.2 (2014).
- Salim, Arskal. *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*. Honolulu: University of Hawai'i Press, 2008.
- Samho, Bartolomeus. 'Urgensi Moderasi Beragama untuk Mencegah Radikalisme di Indonesia', *Sapientia Humana: Jurnal Sosial Humaniora*, 2.1 (2022).
- . 'Urgensi "Moderasi Beragama" untuk Mencegah Radikalisme di Indonesia', *Sapientia Humana: Jurnal Sosial Humaniora*, 2.1 (2022).
- Schmid, Alex P. 'Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion and Literature Review' (ICCT Research Paper, 2013).
- Setia, Paelani. *Kampanye Moderasi Beragama: Dari Tradisional menuju Digital*. Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama Uin Sunan Gunung Djati, 2021.
- Shihab, M. Alwi. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan, 1997.
- Sholahudiin, Al-Fatih, dan Zaka Firma Aditya. 'The Legal Protection Against Terrorism Suspects in Indonesia (Case Study of the Arrest Process of Terrorism Suspects by Densus 88)', *Legality*, 27.1 (2019).
- Silvia, Rahmelia dan Chris Apandie. 'Fostering Religious Moderation's Perception in the 4.0 Era: Citizenship Education Challenge', *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 418 (2021).
- Sidel, John T. *Republicanism, Communism, Islam: Cosmopolitan Origins of Revolution in Southeast Asia*. New York: Cornell University, 2021.
- . *Riots, Pogroms, Jihad: Religious Violence in Indonesia*. New York: Cornell University, 2006.

- Smith, Anthony L. 'Indonesia in 2002: Megawati's Way', dalam *Southeast Asian Affairs 2003*, ed. Daljit Singh dan Chin Kin Wah. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003.
- Suaedy, Ahmad. 'Transformasi Islam Indonesia dalam Trend Global: Mencari Penjelasan "Moderasi Beragama" di Ruang Publik'. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 24.3 (2022).
- Subchi, Imam, dan Halid. *Sejarah Kementerian Agama Era Reformasi: Dari Kebijakan Agama Masa Transisi hingga Konsolidasi Demokrasi*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Suhadi, dan Miftahun Ni'mah Suseno. 'The Survey of Ulama and The Nation-State', dalam *Ulama and The Nation-State: Comprehending the Future of Political Islam in Indonesia*. Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2019.
- Suharto, Babun, dkk. *Moderasi Beragama: Dari Indonesia untuk Dunia*. Yogyakarta: LKiS, 2019.
- Sumintak, dan Iin Ratna Sumirat. 'Moderasi Beragama dalam Perspektif Tindakan Sosial Max Weber', *Al-Adyan*, 3.1 (2022).
- Suntoro, Agus. 'Penerapan Asas dan Norma Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme', *Negara Hukum*, 11.1 (2020).
- Suryana, A'an. 'The Shi'as and Freedom of Religion under Joko Widodo's Presidency', *ISEAS*, 62 (2022).
- Sutanto, Trisno, dkk. 'Menakar Moderasi Beragama: Pembacaan Kritis', dalam *Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama: Suatu Tinjauan Kritis*, ed. Zainal Abidin Bagir dan Jimmy M.I, Sormin. Jakarta: Gramedia, 2022.
- Sutanto, Trisno. 'Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama' (Yakoma PGI, 2022).
- Syahid, Achmad. 'Lukman Hakim Saifuddin: Pembawaan Normatif, Kebijakan Inklusif dan Legasi Prestasi', dalam *Lukman Hakim Saifuddin (Gagasan-Kinerja: Moderasi Beragama dan Transformasi Kelembagaan Pendidikan)*. Jakarta: Rehobot Literature (Bersama dengan Ditjen Bimas Kristen RI), 2019.
- Tahir, Suaib, dkk. *Buku Panduan Pencegahan Radikalisme di Lingkungan Kerja BUMN dan Perusahaan Swasta* (Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme (BNPT), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kamar Dagang dan Industri (KADIN Indonesia), 2020).

Tanadi, Egi. 'Indonesia. Negeri Seribu Moderasi: Kritik Historiografis-Netnografis Terhadap Pelaksanaan SK Menag Nomor 529 Tahun 2021 Tentang Penguatan Program Moderasi Beragama', dalam Alquran, Keragaman dan Keindonesiaan -1: Bunga Rampai Makalah Alquran LKTIQ MTQ Kalbar 2022, ed. Ibrahim, Zaenuddin, Yusriadi (Kalimantan Barat: LKTIQ MTQ Kalbar, 2023).

Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama RI. *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020.

Tim KontraS. *Politik Militer dalam Transisi Demokrasi Indonesia*. Jakarta: KontraS, 2005.

United Nations. 'Resolutions Promoting Moderation, Establishing International Day of Living Together in Peace Adopted by General Assembly' (Meetings Coverage and Press Releases, 2017).

United States Department of State: Office of International Religious Freedom. *International Religious Freedom Report for 2020* (United States, 2021).

Vermonte, Philips J., dkk. *Gerakan 'Hibrida' Aksi Bela Islam: Aktor, Struktur, Motivasi dan Pendanaan* (Jakarta, 2020).

Vermonte, Philips J. 'Survei Opini Publik dan Counter-Violent Extremism', dalam *Asking Sensitive Questions: Panduan Pelaksanaan Survei dengan Tema Tindakan Ekstrem Berbasis Agama dan Non-Agama* (Centre for Strategic and International Studies, 2019).

Warburton, Eve. 'How Polarised Is Indonesia and Why Does It Matter?', dalam *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?*. Terrace: ISEAS, 2020.

Ward, Ken. 'Indonesian Terrorism: From Jihad to Dakwah?', dalam *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*, ed. Greg Fealy dan Sally White. Singapore: ISEAS Publications, 2008.

Widya, Bella. 'Pemahaman Takfiri terhadap Kelompok Teror di Indonesia: Studi Komparasi Jamaah Islamiyah dan Jamaah Ansharut Daulah', *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan*, 12.2 (2020).

YLBHI. *Laporan Yayasan LBH Indonesia tentang: Terorisme dan Perppu No. 1 Tahun 2002*, 2002.

Yusdani, dan Muntoha. *Hubungan Agama dan Negara dalam Negara Pancasila Pasca Reformasi Menurut Organisasi Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)* (Yogyakarta, 2014).

Zada, Khamami. 'Politik Pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh dan Kelantan (1993-2014)', *Al-Ihkam*, 10.1 (2015).

Zawawi, Ali, dkk. *Kiprah Para Menteri Agama Era Reformasi*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Zulfadli, Dewi Anggraini dan Mhd. Fajri. 'From Formalization of Sharia to Islamic Conservatism: The Post Reform of Islamic Movement Phenomena in West Sumatera', *Al-A'raf*, XVII.1 (2020).

### Internet

Adam. 'Ikuti Muhammadiyah, Kapolri: Kami Sami'na wa Atho'na Gunakan Pendekatan Moderasi dalam Mengatasi Radikalisasi', *muhammadiyah.or.id*, 2021 [diakses 19 Juli 2023]

———. 'Moderasi Itu Bukan Hanya untuk Melawan Ekstremisme Tapi untuk Membangun Konstruksi Tengahan', *muhammadiyah.or.id*, 2020 [diakses 17 Juli 2023]

Afandi. 'LDK PP Muhammadiyah Kuatkan Moderasi Mubaligh 3 T, Sekaligus Kunjungi Pengungsian Eks Timor-Timur', *muhammadiyah.or.id*, 2021 [diakses 19 Juli 2023]

———. 'PP Pemuda Muhammadiyah Ikuti Deklarasi Pemuda Negarawan Lintas Agama', *muhammadiyah.or.id*, 2022 [diakses 19 Juli 2023]

Ahmad, Imam Khusnin. 'IAIN Kediri Bertekad Perkuat Moderasi Beragama Civitas Akademika', *nu.or.id*, 2019 [diakses 18 Juli 2023]

Al-Barbasy, Ma'mun Murod. 'Moderasi Beragama Tanpa Makna', *Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 2022

Al-Jam'iyatul Washliyah. 'Melacak Moderasi Al Washliyah', *washliyah.or.id*, 2021 [diakses 17 Juli 2023]

- . ‘Washliyah Penggagas Atmosfer Moderasi Beragama’, *washliyah.or.id*, 2021 [diakses 17 Juli 2023]
- Andi. ‘Kemenag: Media Islam Harus Memiliki Pandangan Moderasi Beragama’, *ahlulbaitindonesia.or.id*, 2020 [diakses 17 Juli 2023]
- . ‘Kementrian Agama Luncurkan Buku Moderasi Beragama’, *ahlulbaitindonesia.or.id*, 2019 [diakses 19 Juli 2023]
- Andrios, Benny. ‘Pagu Indikatif Kemenag Tahun 2023 Naik Jadi Rp69 Triliun’, *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2022 [diakses 12 Juli 2023]
- Ardianto, Aan. ‘Luncurkan 1.000 Dai Agen Perdamaian, Muhammadiyah Jawa Timur Diganjar Penghargaan Rekor MURI’, *muhammadiyah.or.id*, 2021 [diakses 19 Juli 2023]
- . ‘Moderat Beragama Bukan Berarti Tidak Berprinsip’, *muhammadiyah.or.id*, 2021 [diakses 17 Juli 2023]
- Armaidi, Bagindo. ‘Ansor Pasaman Barat Gelar Seminar Nasional Moderasi Beragama, Perbedaan Jadikan Kekuatan’, *nu.or.id*, 2021 [diakses 18 Juli 2023]
- Aspari. ‘Launching Kampung Moderasi Beragama Desa Tunggal Bhakti Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau’, *Kemenag Kalbar*, 2023 [diakses 26 Juni 2023]
- Asrori, Ali Musthofa. ‘Balitbang Diklat Kemenag Luncurkan “Moderasi Beragama”’, *nu.or.id*, 2019 [diakses 18 Juli 2023]
- Azra, Azyumardi. ‘Kembali ke Jati Diri (2)’, *Republika*, 24 November 2016
- Billy. ‘FSGI: Moderasi Beragama 2022 Di Sekolah Masih Buruk’, *Ahlulbaitindonesia.or.Id*, 2023 [diakses 17 Juli 2023]
- . ‘Kemenag: Penguatan Moderasi Beragama Harus Dilakukan Bersama Kementerian Dan Lembaga’, *ahlulbaitindonesia.or.id*, 2021 [diakses 17 Juli 2023]
- . ‘Kemenag Beberkan Tiga Tantangan Moderasi Beragama di Indonesia’, *ahlulbaitindonesia.or.id*, 2021 [diakses 17 Juli 2023]
- . ‘Kemenag Lantik 42 Fasilitator Moderasi Beragama’, *ahlulbaitindonesia.or.id*, 2021 [diakses 19 Juli 2023]



- . ‘Kemenag RI Ajak ABI Dukung Program Moderasi Beragama’, *ahlulbaitindonesia.or.id*, 2021 [diakses 19 Juli 2023]
- . ‘Pemuda Berperan Penting dalam Moderasi Beragama’, *ahlulbaitindonesia.or.id*, 2021 [diakses 17 Juli 2023]
- . ‘Peran Perpustakaan untuk Moderasi Beragama’, *ahlulbaitindonesia.or.id*, 2021 [diakses 17 Juli 2023]
- . ‘Prof. Oman: Moderasi Beragama Masih Sering Disalahpahami’, *Ahlulbaitindonesia.or.Id*, 2023 [diakses 17 Juli 2023]
- Chalik, Ainuddin. ‘Aziz Qahhar Narasumber Kajian Ilmiah Moderasi Beragama Di Timika’, *hidayatullah.or.id*, 2022 [diakses 19 Juli 2023]
- Faiz, Muhammad Fauzinudin. ‘Moderasi Beragama: Pilar Kebangsaan dan Keberagaman’, *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2023
- Faizin, Muhammad. ‘PBNU Gelar Workshop Moderasi Beragama di Serambi Makkah’, *nu.or.id*, 2022 [diakses 17 Juli 2023]
- Farisa, Fitria Chusna. ‘Breaking News: Yaqut Cholil Qoumas Gantikan Fachrul Razi sebagai Menteri Agama’, *kompas.com*, 2020 [diakses 12 Juli 2023]
- Hidayatullah. ‘Dr Syamsuddin Arif Bicara Moderasi Beragama di Kampus Induk’, *hidayatullah.or.id*, 2023 [diakses 19 Juli 2023]
- Jati, Wasisto Raharjo. ‘Nahdlatul Ulama’s Traditionalist Campaign Shaping Mainstream Indonesian Islamic Discourse’, *Fulcrum: Analysis on Southeast Asia*, 2022 [diakses 15 Juli 2023]
- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo. ‘Kampung Moderasi Beragama, Mercusuar Harapan dan Inspirasi dalam Menjaga Keberagaman’, *Kemenag Jateng*, 2023 [diakses 26 Juni 2023]
- . ‘Launching Kampung Moderasi Beragama’, *Kemenag Jateng*, 2023 [diakses 26 Juni 2023]
- Kementerian Agama Republik Indonesia. ‘Kemenag-DPR Bahas Program dan Anggaran Tahun 2020’, *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2019 [diakses 12 Juli 2023]
- . ‘Kemenag Bekali Penyuluh Agama sebagai Penggerak Kampung Moderasi’, *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2023 [diakses 26 Juni 2023]

- \_\_\_\_\_. 'Kemenag Siapkan Instruktur Nasional Moderasi Beragama', *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2019
- \_\_\_\_\_. 'Presiden Jokowi Lantik Saiful Rahmat Dasuki sebagai Wakil Menteri Agama', *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2023 [diakses 19 Juli 2023]
- \_\_\_\_\_. 'Realisasi Anggaran 2014, Kemenag Masih 10 Besar', *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2015 [diakses 12 Juli 2023]
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 'Sejarah Kementerian Hukum Dan HAM', *Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 2017 [diakses 3 Juni 2023]
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. 'Wapres: Ulama Dunia Akui Indonesia Mampu Praktikkan Islam yang Moderat dan Toleran', *Kementerian Komunikasi dan Informatika*, 2021
- \_\_\_\_\_. 'Menag Yaqut: Kontribusi Positif NU untuk Bangsa Perlu Terus Dijaga', *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2022
- Kulsum, Kendar Umi. 'Yaqut Cholil Qoumas', *Kompas*, 2021
- Kurniawan. 'Realisasi Anggaran Kemenag per 27 Juli 2022 Capai 55,55%', *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2022 [diakses 12 Juli 2023]
- Kurniawan, Alhafiz. 'Kemenag RI Gelar Konferensi Internasional Moderasi Beragama di Ruang Digital', *nu.or.id*, 2022 [diakses 18 Juli 2023]
- LDII. Dewan Pimpinan Pusat, 'DPD LDII Kota Bekasi Gelar Webinar Kebangsaan dan Moderasi Beragama', *ldii.or.id*, 2022 [diakses 18 Juli 2023]
- \_\_\_\_\_. 'Gelar Sarasehan, LDII Sulawesi Utara Tingkatkan Wawasan Kebangsaan dan Moderasi Beragama', *ldii.or.id*, 2021 [diakses 18 Juli 2023]
- \_\_\_\_\_. 'Kemenag: Kerukunan Dapat Diwujudkan dengan Moderasi Beragama', *ldii.or.id*, 2021 [diakses 17 Juli 2023]
- \_\_\_\_\_. 'Kemenag Pringsewu Apresiasi Langkah LDII Gaungkan Moderasi Beragama', *ldii.or.id*, 2022 [diakses 18 Juli 2023]
- \_\_\_\_\_. 'Ketua DPW LDII Lampung Ingatkan Jaga Kerukunan dalam Keberagaman di Rapimda Pemuda Katolik', *ldii.or.id*, 2022 [diakses 18 Juli 2023]

- . ‘LDII: Silaturahmi Elemen Membangun Moderasi Beragama’, *ldii.or.id*, 2022 [diakses 17 Juli 2023]
- . ‘LDII Gelar Silaturahmi Ormas Islam, Tingkatkan Kerukunan dan Kebersamaan’, *ldii.or.id*, 2021 [diakses 18 Juli 2023]
- . ‘LDII Hadiri Sosialisasi Moderasi Beragama Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan’, *ldii.or.id*, 2022 [diakses 18 Juli 2023]
- . ‘LDII Jatim Bekali 1.100 Juru Dakwah dengan Moderasi Beragama’, *ldii.or.id*, 2022 [diakses 18 Juli 2023]
- . ‘LDII Silaturahmi dengan Kemenag Kota Cimahi Bahas Moderasi Beragama’, *ldii.or.id*, 2022 [diakses 18 Juli 2023]
- . ‘LDII Ungkap Penceramah Memiliki Peran Penting dalam Penguatan Moderasi Beragama’, *ldii.or.id*, 2022 [diakses 17 Juli 2023]
- . ‘Mantan Menag Lukman Hakim Saifuddin: Moderasi Agama Fokus pada Nilai Universal’, *ldii.or.id*, 2022
- . ‘Moderasi Beragama Menurut Mantan Menag Lukman Hakim Saifuddin’, *ldii.or.id*, 2022 [diakses 17 Juli 2023]
- . ‘Perkuat Kebersamaan dan Toleransi, DPD LDII Semarang Gelar Diskusi Panel Moderasi Beragama’, *ldii.or.id*, 2022 [diakses 18 Juli 2023]
- . ‘Siapapun Ketua Terpilih, LDII DKI Jakarta Konsisten Pada Moderasi Beragama’, *ldii.or.id*, 2020 [diakses 18 Juli 2023]
- Lumbanrau, Raja Eben. ‘Pengangkatan Yaqut Cholil Qoumas yang “Tegas dan Tidak Kenal Kompromi” sebagai Menteri Agama untuk “Meredam Kelompok Islam Garis Keras”’, *BBC News Indonesia*, 2020 [diakses 13 Juli 2023]
- Maharani, Putri. ‘Ma’ruf Amin Ajak Umat Islam Kedepankan Sikap Moderat’, *perti.or.id*, 2022 [diakses 19 Juli 2023]
- Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia. ‘Hardisoesilo: Sosialisasi Empat Pilar MPR Berbeda dengan P4 dan UKP-PIP’, *MPR RI*, 2017 [diakses 2 Juni 2023]
- Mashudi, Didik. ‘Kota Kediri Launching Tiga Kampung Moderasi Beragama di Tiga Kecamatan Ini’, *surya.co.id*, 2022 [diakses 26 Juni 2023]

- Mudzhar, M. Atho, 'Perkembangan Islam Liberal di Indonesia', *Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI*, 2009 [diakses 21 Januari 2023]
- Muhammad, Zunus. 'Bendung Paham Radikalisme, Dirjen Pendis Kemenag Didik Instruktur Nasional Moderasi Beragama', *nu.or.id*, 2019 [diakses 18 Juli 2023]
- . 'Eny Yaqut : Cinta, Kasih Sayang dan Penghormatan Tiga Pilar Moderasi Beragama', *nu.or.id*, 2021 [diakses 19 Juli 2023]
- Muhammadiyah, Redaksi. 'Azyumardi Azra: Muhammadiyah Cerminan yang Cocok Moderasi Beragama', *muhammadiyah.or.id*, 2020 [diakses 17 Juli 2023]
- Muhtadi, Burhanuddin. 'Rasionalitas Pemilih Jakarta', *Kompas*, 2017 [diakses 1 Juni 2023]
- Nasril, Muhammad. 'Kemenag Tetapkan Dua Gampong Moderasi di Aceh Barat', *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2023 [diakses 26 Juni 2023]
- NF, Muhammad Syakir. 'Uninus Bandung Jadi Bagian Perguruan Tinggi dalam Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara', *nu.or.id*, 2022 [diakses 17 Juli 2023]
- Oktavia, Happy. 'Banyuwangi Miliki Kampung Moderasi Beragama, Begini Keunikannya', *Tvonenews.com*, 2023 [diakses 26 Juni 2023]
- Persis. 'Beri Edukasi tentang Moderasi Beragama, PD Pemuda PERSIS Gelar Seminar', *persis.or.id*, 2022 [diakses 19 Juli 2023]
- Progo. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon, 'Gerebeg Sampah; Geliat Kampung Moderasi Beragama di Giripeni Wates', *Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo*, 2023 [diakses 26 Juni 2023]
- Qoumas, Yaqut Cholil. 'Opening Ceremony AICIS 2022' (AICIS TV, 2022)
- Republika. 'DPR: Anggaran Moderasi Beragama Naik Jadi R0 3,2 T', *Republika*, 2021 [diakses 26 Juni 2023]
- Ridwan. 'Religion Forum (R-20): Mempromosikan Moderatisme Global', *Media Indonesia*, 2022 [diakses 11 Juni 2023]
- Setiawan, Kendi. 'Halaqah Daiyah Fatayat NU Tekankan Pentingnya Penyebaran Moderasi Beragama', *nu.or.id*, 2021 [diakses 18 Juli 2023]

- . ‘ISNU Tebo Jambi Kenalkan Moderasi Beragama Bagi Pelajar’, *nu.or.id*, 2022 [diakses 17 Juli 2023]
- . ‘Kemenag Gandeng Pergunu Kuatkan Moderasi Beragama’, *nu.or.id*, 2021 [diakses 17 Juli 2023]
- . ‘Meneladani Cara Pandang Kiai Hasyim Muzadi dalam Menerapkan Moderasi Beragama’, *nu.or.id*, 2023 [diakses 19 Juli 2023]
- . ‘Menguak Nilai Moderasi dari Akulturasi dan Kearifan Lokal Rumah Ibadah Bersejarah’, *nu.or.id*, 2021 [diakses 19 Juli 2023]
- . ‘Nilai Moderasi Beragama dalam Serat Carub Kandha’, *nu.or.id*, 2021 [diakses 19 Juli 2023]
- Sucahyo, Nurhadi. ‘Mencari Titik Temu Agama dan Budaya’, *VOA*, 2018 [diakses 8 March 2023]
- . ‘R20: Peran Besar Indonesia dalam Rekonsiliasi Umat Beragama’, *VOA*, 2022 [diakses 11 Juni 2023]
- Susanto. ‘Tiga Desa Ditetapkan Jadi Kampung Moderasi Beragama’, *Suara Merdeka Banyumas*, 2023 [diakses 26 Juni 2023]
- Suwendi. ‘Moderasi Beragama dan Civil Society’, *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2021
- Syifa. ‘Film Pendek Karya Mahasiswa Muhammadiyah Sabet Juara 1 Film Moderasi Beragama Kemenag RI’, *muhammadiyah.or.id*, 2021 [diakses 19 Juli 2023]
- . ‘Kiai Dahlan dan Kiai Hasyim, Contoh Dua Ulama Pembawa Islam yang Damai’, *muhammadiyah.or.id*, 2022 [diakses 17 Juli 2023]
- . ‘Wasathiyah Islam Ala Muhammadiyah’, *muhammadiyah.or.id*, 2020
- Tahir, Masnun. ‘Meneguhkan Peran Agama Melalui G20, R20, dan AICIS 2022’, *nu.or.id*, 2022 [diakses 12 Juni 2023]
- Taufiq, Andi. ‘Memaknai Moderasi Beragama’, *PB DDI*, 2023 [diakses 17 Juli 2023]
- Triono, Aru Lego. ‘Alissa Wahid: Media Jadi Ekosistem Pemengaruh Praktik Moderasi Beragama’, *nu.or.id*, 2021 [diakses 19 Juli 2023]

- . ‘LP Ma’arif PBNU Dorong Tenaga Pendidik Terapkan Praktik Moderasi Beragama di Sekolah’, *nu.or.id*, 2023 [diakses 17 Juli 2023]
- . ‘Lukman Hakim Saifuddin Sebut Tiga Penyebab Pentingnya Penguatan Moderasi Beragama’, *nu.or.id*, 2021 [diakses 19 Juli 2023]
- . ‘Pra-Rakernas, LPT PBNU Susun Kurikulum Keaswajaan dan Moderasi Beragama’, *nu.or.id*, 2023 [diakses 17 Juli 2023]
- Ucox. ‘Sejarah Singkat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI’, 2020 [https://pusdik.mkri.id/materi/materi\\_222\\_4\\_Pilar\\_MPR\\_RI .pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_222_4_Pilar_MPR_RI.pdf)
- Wahdah Islamiyah. ‘Ketua DPW Sul-Sel Hadiri Undangan Kementerian Agama Wilayah Sulsel dalam Kegiatan Focus Grup Discussion’, *wahdah.or.id*, 2021 [diakses 19 Juli 2023]
- . ‘Ummat Pertengahan (Ummat[an] Wasath[an]) dan Moderasi Beragama’, *wahdah.or.id*, 2021 [diakses 17 Juli 2023]
- Wahid, Abd. ‘Kampung Moderasi Beragama Pertama di Lumajang Terbentuk, Ini Harapannya’, *INewsProbolinggo.id*, 2022 [diakses 26 Juni 2023]
- Widodo, Joko. ‘Amanat Presiden Jokowi Pada Rakornas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)’ (Sekretariat Presiden, 2020)
- . ‘Sambutan Presiden Jokowi Pada Resepsi Puncak Satu Abad NU’ (Sekretariat Presiden, 2023)
- Yahya, Imam. ‘Tadarus Litapdimas Seri 3/2023: Kontribusi PTKI dalam Moderasi Beragama’ (Subdit Litapdimas, 2023)
- Yenti. ‘Perti: Moderasi Agama Sudah Ada Dalam Islam Sejak Dulu’, *perti.or.id*, 2022 [diakses 17 Juli 2023]